



THINK OUTSIDE THE BOX

*Cetak Masyarakat Perikanan Mandiri Melalui
Penyuluhan Perikanan di Era Digital*



THINK OUTSIDE THE BOX

CETAK MASYARAKAT MANDIRI
MELALUI PENYULUHAN PERIKANAN
DI ERA DIGITAL

THINK OUTSIDE THE BOX
CETAK MASYARAKAT MANDIRI MELALUI
PENYULUHAN PERIKANAN DI ERA DIGITAL

Penulis : Lilly A. Pregiwati
Tim Penyusun : Ikhsan Haryadi
M. Faisol Rizaghozali
Azmi Nasution
Cece Sudrajat
Asep Sopiyan
Kontributor : Andi Trisnawati
Siti Khadijah
Nesti R. Romeon
Dwi Wahyuni
Dedi Sutisna
Anggih Isti Choeronawati
Hendy Dwi Setiawan
Agustinus Haurissa
Fathur Razi
Yusuf Saady
Penyunting : Wiko Rahardjo
Dokumentasi : Tim Humas Puslatluh, BRSDM, KP
Tata Letak : Prayitno
Penerbit : Amafrad Press
Alamat : Gedung Mina Bahari III Lt.6
Jl Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat
Halaman : XII + 104 hal
ISBN : 978-623-7651-85-7
978-623-7651-86-4 (pdf)



Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memproduksi sebagian maupun seluruh dari buku ini dalam bentuk atau cara apapun tanpa izin dari penerbit.

Tim Penyusun

Dr. Lilly A. Pregiwati S.Pi, M.Si

Ikhsan Haryadi, S.Pi.,M.Si

M. Faisol Rizaghozali, S.Pi., M.Si

Azmi Nasution, S.Si., M.Si

Cece Sudrajat, S.St.Pi., M.AP

Asep Sopiyan, A.Pi., MP

Daftar Isi

Kata Pengantar	VII	BAB V	
Prakata	X	Penumbuhan Kelompok dan Digitalisasi Sarana	43
BAB I		5.1 Penyuluh Menumbuhkan kelompok Masyarakat	
Penyuluh Perikanan Sebagai Agen Perubahan	1	Sektor Kelautan Perikanan	46
1.1 Peran dan Inisiatif Penyuluh Perikanan	2	5.2 Pendampingan Akses Permodalan	50
1.2 Penyuluh sebagai Agen Perubahan	5	5.3 Dukungan Sarana dan Prasarana Teknologi Digital	52
BAB II		BAB VI	
Penyuluh Perikanan di Era Masyarakat Digital	11	Loyalitas dan Bakti untuk Negeri	59
2.1 Masyarakat Digital	12	BAB VII	
2.2 Strategi Penyuluh Perikanan Lewat E-Penyuluh	15	Pembuktian Penuntas Dendam	67
2.3 Mendorong Sinergi Bersama Pemerintah Daerah	17	BAB VIII	
BAB III		Pantang Menyerah Mengubah <i>Mindset</i> Pelaku	
Inovasi Penyuluhan Perikanan Digital	21	Usaha Utama	77
3.1 Strategi Penyuluhan “DARING” di Masa Pandemi	22	BAB IX	
3.2 Penyuluh JENIUS, Masyarakat Sejahtera	23	Konsistensi Berbuah Manis	83
3.3 Mengubah Keterbatasan Menjadi Kesuksesan	27	BAB X	
BAB IV		Sabar Pembuka Jalan Kesuksesan	89
Beramal Ilmu dengan Menjadi Penyuluh Swadaya	33	Daftar Pustaka	98
4.1 Penyuluh Perikanan Swadaya (PPS) sebagai Mitra		Profil Penulis	100
Pemerintah dan Masyarakat	35		
4.2 PPS adalah Tugas Mulia	37		

Kata Pengantar

Sjarief Widjaja

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian
Kelautan dan Perikanan

Menciptakan Generasi Masyarakat Perikanan Maju di Era Digital

*D*igital society atau “masyarakat digital” selama ini identik dengan anak-anak remaja yang kerap dijuluki sebagai generasi milenial. Mereka memiliki ciri gemar berkomunikasi dalam kelompok, melakukan transaksi bisnis dan eksplorasi ide, berkantor bersama, dan melahirkan kreativitas. Namun kita harus memahami bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya bukanlah masyarakat dengan ciri-ciri seperti itu. Masyarakat digital mungkin banyak kita lihat dan temukan sebagai komunitas-komunitas di masyarakat di kota-kota besar namun tidak di desa. Masyarakat desa Indonesia masih merupakan masyarakat dengan kultur tradisional dan kearifan lokal.

Meskipun demikian, di desa sangat berpotensi dikembangkan transaksi bisnis dengan konsep *digital society* ini mengingat kekayaan yang dimilikinya. Syarat utama membentuk *digital society* adalah ketersediaan infrastruktur dan internet. Dengan kedua sarana tersebut, masyarakat desa dapat didorong beralih ke *digital society* dengan cara yang benar.

Selama ini masyarakat desa menerima teknologi terbaru turunan dari Ibu Kota Jakarta yang kemudian masuk ke kota-kota besar, kab/kota kecil, baru menyentuh desa itu sendiri. Selama proses turunan tersebut terjadi pengurangan kelengkapan sebagai penunjang pembentukan konsep *digital society* itu sendiri.

Oleh karena itu, Puslatluh KP perlu membuat terobosan dengan menciptakan agen-agen perubahan di desa-desa yang dibekali dengan literasi digital yang benar dan lengkap. Mereka ini yang akan mengajar masyarakat desa sehingga apa yang diperoleh masyarakat desa sama dengan yang diperoleh masyarakat kota besar.

Agen perubahan ini adalah penyuluh perikanan yang merupakan lulusan-lulusan terbaik dari sektor kelautan dan perikanan. Contoh peranan agen perubahan dapat dilihat di bidang seni di Bali dan Yogyakarta. Melalui bule-bule atau pendatang dari luar, kedua kota ini mampu berkembang dengan memadukan pariwisata, seni (*art*), dan digital.

Para pendatang sebagai agen perubahan melakukan akulturasi budaya dan membawa *direct transformation* bagi masyarakat sekitar. Maka tak heran jika di Bali atau Yogyakarta kita dengan mudah menemukan tempat-tempat

wisata yang menampilkan seni lokal dengan sentuhan desain negara luar sebut saja Italia, menggunakan transaksi modern dengan *debit/credit card*, dan menghasilkan *added value* yang tinggi sehingga masyarakat sejahtera. Keberhasilan pengembangan ini pun kembali diputar untuk melakukan pengembangan misalnya dengan membangun galeri dan sebagainya.

Seperti ini pula yang diharapkan kepada penyuluh perikanan yang menjadi agen perubahan agar dapat membantu transformasi masyarakat pedesaan menjadi *digital society*.

Di bidang kelautan dan perikanan kita sebenarnya sudah memiliki banyak contoh *digital society*. Beberapa diantaranya, Kampung Wisata Mina Padi Samberembe, Kampung Garam Kebumen, Patin Perkasa Tulung Agung, dan beberapa desa inovasi lainnya yang dibentuk berkat Puslatluh KP sudah hampir menuju ke *digital society*. Namun masih dibutuhkan pengembangan perangkat dan desain yang tepat.

Ibarat tren desain di sektor kuliner saat ini, di mana mereka meletakkan dapur nya di bagian depan sehingga pelanggan dapat melihat proses pembuatan, sektor perikanan juga harus membiarkan masyarakat tahu bagaimana proses pembuatan magot, pakan, dan sebagainya. Proses ini harus ditampilkan secantik dan serapi mungkin.

Sebagai agen perubahan, penyuluh perikanan berperan untuk memutus mata rantai transformasi budaya yang dilakukan bertahap. Jadi transformasi dilakukan lompat langsung kepada masyarakat di tingkat desa dengan tidak meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki namun dilengkapi dengan perangkat digital. Dengan demikian, desa dapat berkomunikasi langsung dengan internasional. Desa harus bisa membangun *networking* sendiri dengan dunia internasional dan menarik perhatian masyarakat internasional.

Buku “*Think Outside The Box: “Cetak Masyarakat Mandiri melalui Penyuluhan Perikanan di Era Digital”* ini telah dengan baik menceritakan pemikiran-pemikiran *outside the box* tentang penyuluhan perikanan. Saya pikir, pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif memang sangat dibutuhkan dari para penyuluh perikanan jika ingin mencetak generasi masyarakat perikanan di era serba digital ini.

Akhir kata, saya berharap banyak buku ini mampu menjadi wahana *knowledge sharing* dalam kegiatan penyuluhan perikanan dan juga masyarakat luas, khususnya mereka yang memiliki perhatian pada pembangunan masyarakat pemikiran dan juga para pejabat pembuat kebijakan.

Terima Kasih.

Jakarta, November 2020

Sjarief Widjaja

Kepala BRSDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Prakata

Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si.
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP)

Apakah yang Anda pikirkan ketika mendengar kata ‘penyuluh perikanan’? Mungkin Anda akan terbayang orang-orang bersahaja yang hidup berbaur dengan masyarakat. Mereka yang ikut memegang jala, menebar pakan, atau menyauk ikan di kolam. Mungkin pula ada yang membayangkan mereka yang sibuk mengurus segala bentuk administrasi dan perizinan demi kenyamanan kelompok binaannya. Tak keliru. Memang begitulah sebagian dari kegiatan penyuluhan. Namun di era digitalisasi ini, kegiatan penyuluhan tampaknya akan semakin kompleks.

Buku yang saat ini berada di tangan Anda adalah pengejawantahan segala kegiatan penyuluhan menjawab tantangan era digitalisasi di tengah masyarakat digital (*digital society*). Tentunya, menghadapi tantangan ini, komunikasi dan interaksi penyuluh perikanan tak bisa lagi dilakukan secara biasa. Perlu ada inovasi dan kreasi agar tercipta pertukaran ide. Transaksi yang terjadi bukan hanya searah, penyuluh memberi dan masyarakat menerima, melainkan eksplorasi bersama.

Kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat kota yang maju dan dekat dengan akses informasi tentunya juga akan berbeda dibandingkan penyuluhan terhadap masyarakat desa dengan kultur dan kearifan lokal yang kental. Hal ini perlu menjadi pertimbangan untuk merumuskan kegiatan penyuluhan yang tepat.

Sebagai agen perubahan, penyuluh perikanan harus mampu membawa masyarakat memanfaatkan potensi alam dan keragaman kultur daerah menjadi sesuatu yang bernilai besar. Membangun desa tematik perikanan misalnya. Tidak hanya dengan sentuhan teknologi kelautan dan perikanan terkini, melainkan juga teknologi perangkat digital.

Mungkin kata ‘penyuluh’ membuat buku ini terlalu tersegmentasi. Namun tak hanya bagi penyuluh, buku ini juga dapat menjadi pedoman atau inspirasi bagi semua orang yang ingin berbuat lebih bagi masyarakat. Sebagaimana arti kata ‘penyuluh’ itu sendiri, pembawa penerangan atau cahaya. Kita semua dapat berperan di dalamnya.

Buku berjudul “*Think Outside The Box: Pola Penyuluhan Perikanan di Era Digital*” ini saya tulis dalam 10 bab. Berbeda dari buku penyuluhan pada umumnya, buku ini tak hanya menyajikan kegiatan rutin atau kisah-kisah inspiratif dan humanis, melainkan juga mengemukakan ide-ide pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang akan selalu menarik untuk diperbincangkan. Mungkin saja buku ini akan mengusik dan membangunkan ide-ide yang sempat tertidur di benak pembaca.

Melalui buku ini saya ingin mengajak semua pembaca untuk memanfaatkan akal budi, pengetahuan, dan teknologi dalam menjalankan panggilan nurani. Menyuluh berarti melayani dengan penuh bakti. Hadiahnya adalah kepuasan hati yang tak terukur materi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Tanpa cerita dan pengalaman, masukan, ide/pemikiran, serta pandangan yang disuntikkan, tentunya buku ini tak akan pernah ada di tangan Anda. Meski buku ini telah rampung, saya menyadari masih terdapat kekurangan yang masih perlu perbaikan dan penyempurnaan ke depan.

Akhirnya, selamat membaca. Semoga buku ini dapat memberi manfaat untuk Anda. Atau setidaknya memberi secuil perspektif baru yang pantas untuk dipertimbangkan.

Jakarta, November 2020

Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi., M.Si.

*Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan KKP*

BAB I

PENYULUH PERIKANAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

Suasana sejuk dan asri terasa begitu memasuki Dusun Samberembe. Hamparan sawah hijau nan luas terasa sangat memanjakan sejauh mata memandang. Padi-padi tumbuh subur dengan batang nan kokoh dan bulir penuh berisi. Dilihat lebih dekat, ikan-ikan nila merah gemuk hilir mudik di celah-celah kecil pematang sawah. Udang-udang galah tak kalah menunjukkan kehadirannya. Bersembunyi malu-malu di antara sela-sela batang padi. Samberembe adalah sebuah dusun kecil di Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejak tahun 2014, dusun ini menjadi perhatian dunia setelah Food Agriculture Organization (FAO) mengapresiasi kesuksesan program minapadi di dusun tersebut. Minapadi merupakan proses pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian sekaligus budidaya ikan. Organisasi pangan dunia ini bahkan menunjuk Indonesia sebagai rujukan model pengembangan minapadi di Asia Pasifik untuk ketahanan pangan global sesuai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program SDGs tersebut, adalah program yang sudah disepakati oleh dunia dan tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pangan global. Tahun 2015, sebagai kelanjutan dari rujukan FAO tersebut, 13 negara yang masuk kawasan Asia Pasifik menyatakan minatnya terhadap

sistem minapadi Indonesia. Antara lain, Bangladesh, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Vietnam. Seluruh negara tersebut, kemudian secara khusus datang ke Yogyakarta untuk belajar lebih detil tentang minapadi.

1.1 Peran dan Inisiatif Penyuluh Perikanan

Keberhasilan Dusun Samberembe sebagai pusat studi minapadi dunia tak lepas dari peran Frans Hero Making, seorang penyuluh perikanan yang bertugas di Kecamatan Pakem sejak tahun 2012. Frans, begitu ia biasa disapa mengaku awalnya sangat kesal ketika ia dipindahkan dari Kecamatan Ngemplak ke Kecamatan Pakem. Alasannya, saat itu ia sedang bersemangat menjadikan Kecamatan Ngemplak sebagai kawasan Minapolitan (Frans, 2020), sebuah konsep yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2009. Minapolitan merupakan manajemen ekonomi kawasan berbasis komoditas perikanan unggulan dengan fokus pelaksanaan di daerah. Setiap kawasan terdiri atas sentra produksi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kepindahannya ke Pakem pun semakin berat ia jalani manakala mengetahui bahwa kelompok tani di Ngemplak menolak dan berusaha mencegah kepergiannya. Namun sebagai Pegawai Negeri Sipil, Frans mengaku harus siap dengan perintah mutasi wilayah kerja yang diterimanya.

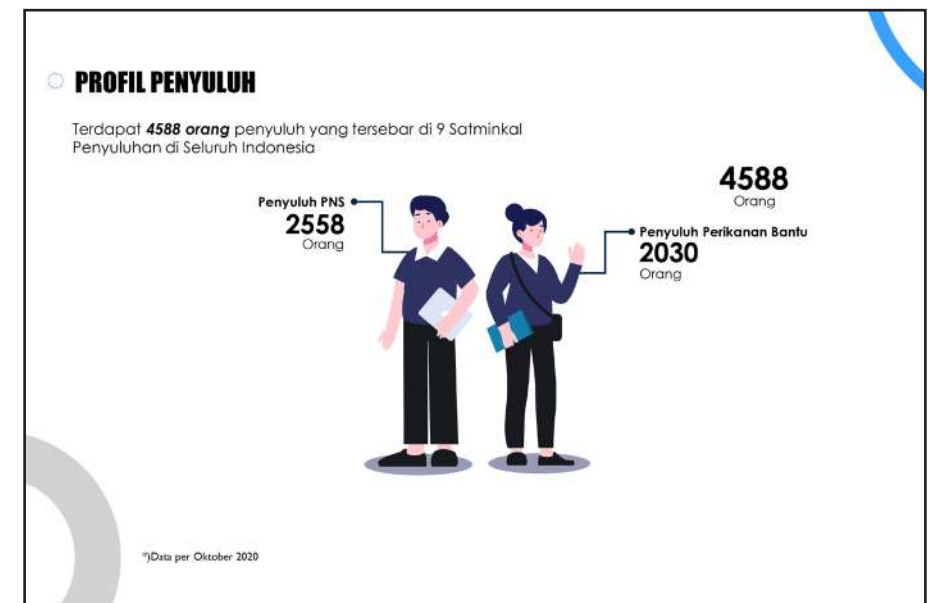
Setelah beberapa hari bertugas di Pakem, Frans melakukan orientasi lapangan kerja. Saat melakukan tugas orientasi itu ia mengaku terpicat dengan kondisi di Dusun Samberembe. Airnya melimpah dan petak sawahnya luas, rata-rata 500 meter persegi (Frans, 2020). Di benaknya terbesit bahwa lokasi ini sangat cocok untuk mengaplikasikan sistem minapadi tanam jajar legowo. Sistem ini mulai dikembangkan Frans selama ia menempuh pendidikan dan latihan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi-(BP Padi) Sukamandi pada tahun 1993.

Tanam Jajar Legowo Minapadi

Di Indonesia, pengembangan sistem minapadi memiliki sejarah yang cukup panjang, bahkan disebut telah dilakukan oleh masyarakat agraris di Tanah Air sejak tahun 1860 di Ciamis, Jawa Barat (Ardiwinata, 1962). Tahun 1970-an, sistem ini mulai bergeliat kembali dan banyak dilakukan petani namun masih dengan cara-cara tradisional. Melalui penelitian yang intensif terbukti bahwa

sistem mina padi mampu meningkatkan produktivitas lahan, sehingga produksi padi meningkat dibanding monokultur padi, dan produksi ikan merupakan nilai tambah yang sangat berarti dalam meningkatkan produksi padi (Syamsiah *et al.*, 1988). Di samping itu, sistem usaha tani mina padi mempunyai keuntungan langsung yang dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat mengurangi input produksi. Keuntungan tidak langsung yaitu dapat memperingan penyiangan, mengurangi penggunaan pestisida dan penggunaan pupuk (Fagi *et al.*, 1989).

Berbagai penelitian dan rekayasa teknologi untuk meningkatkan pendapatan petani sampai mencapai titik maksimal dari usaha budidaya sistem minapadi terus dilakukan. Teknik tanam jajar legowo yang rupanya cukup menunjukkan produktivitas yang tinggi, baik hasil padi maupun ikannya. Dari hasil penelitian BP Padi Sukamandi, produktivitas ikan dari tanam jajar konvensional minapadi 1-1,5 kuintal per hektar, sedangkan dengan sistem tanam jajar legowo produksi ikan mencapai 2-2,5 kuintal per hektar dan produksi padi persatuan luas naik 0,5-2,7 persen (Frans, 2020).



Hasil penelitian BP Padi Sukamandi terhadap tanam jajar legowo minapadi juga menyimpulkan bahwa teknik tersebut berpeluang untuk lebih meningkatkan produksi ikan tanpa mengganggu produksi padi. Dengan demikian dalam satuan luas yang sama pendapatan petani dari usaha tani mina padi dengan tanam jajar legowo lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari usaha tani tanam jajar biasa mina padi (Frans, 2020).

Menurut Frans (2020), praktik minapadi pada tanam jajar konvensional minapadi tanam jajar legowo pada umumnya sama. Perbedaannya terutama pada pelaksanaan tanam padi, waktu dan cara pemupukan, penyiangan, waktu tanam dan panen ikan. Legowo merupakan kombinasi dari dua kata bahwa Jawa, yaitu *lego* (lega) dan *dowo* (panjang). Dalam proses penanaman padi di lahan minapadi dilakukan pengaturan jarak tanam padi antar barisan larikan untuk memberi peluang waktu yang panjang untuk menehkan ikan. Karena selama masa tanam padi tetap memelihara ikan sampai padi dipanen. Dengan adanya lorong bisa meningkatkan hasil padi melalui pemangsaan serangga berbahaya, hama dan gulma serta meningkatkan kesuburan lahan dengan menambahkan bahan organik sebagai akibat adanya lorong legowo (legowo kosong) sehingga sinar matahari bisa masuk penuh dan proses fotosintesa bekerja sempurna (Frans, 2020).

Tahun 2001, ketika ia ditugaskan sebagai penyuluh perikanan di Kecamatan Ngemplak, ia mulai menerapkan teknik tanam jajar legowo minapadi di Dusun Babadan. Keputusan itu diambil ketika ia melihat dinamika Kelompok Budidaya Ikan “Mina Mulya” di dusun tersebut yang begitu dinamis. Selain itu sumber daya alam juga sangat mendukung dan ketersediaan air sangat cukup dari aliran Kali Kuning. Hamparan sawah luas dan lebar antarpetaknya. Hasil yang diperoleh benar-benar membanggakan. Masyarakat mulai sadar, sistem mina padi meningkatkan produktivitas lahan dan akhirnya menambah penghasilan dan kesejahteraan para petani ikan (Frans, 2020). Karena kerja kerasnya, kelompok “Mina Mulya” menjadi juara 1 dalam Lomba Intensifikasi Mina Padi (Inmindi) pada tahun 2002.

Upaya untuk mengulang keberhasilan ia lakukan di Dusun Samberembe. Bersama dengan kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) “Mina Muda Samberembe” ia lalu memanfaatkan

“ *Masyarakat mulai sadar, sistem mina padi meningkatkan produktivitas lahan dan akhirnya menambah penghasilan dan kesejahteraan para petani ikan (Frans, 2020).* ”

kawasan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) yang dikelola Dinas Pertanian Provinsi DIY. Hanya dalam waktu satu minggu, lahan seluas 3.000 meter persegi pun dipersiapkan untuk demplot minapadi dan ugadi (udang galah padi). Hasilnya ternyata sangat sukses. Kelompok merasakan sendiri sejumlah keuntungan. Lahan 3.000 meter persegi di P4S, kini meluas menjadi dua hektar. Produktivitas lahan meningkat, biaya dan waktu bisa ditekan cukup signifikan, hama-hama yang biasanya sering merusak lahan pertanian seperti tikus dan musang air pun dapat di atasi (Frans, 2020). Para pemuda di dusun tersebut pun semakin menguasai teknologi terapan tanam jajar legowo mina padi dengan baik. Dinas di Sleman dan KKP Samberembe sebagai “Kampung Mina Padi”. Dusun ini menjadi pencontohan wilayah produktif di mana satu atau dua sektor unggulan desa jika dikelola dengan tepat dapat memberikan *multiplier effect* bagi seluruh warganya. Masyarakat dapat menekuni dan mengolah komoditas perikanan dan pertanian yang beragam sehingga terbentuk sistem yang saling mendukung. Tak ada lagi pengangguran. Tak ada lagi persaingan. Mereka bergerak bersama dalam harmoni membentuk *circular economy*.

1.2 Penyuluh sebagai Agen Perubahan

Frans adalah satu dari sekian banyak contoh agen perubahan (*agent of change*). Merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, para penyuluh memiliki peranan sebagai ujung tombak dalam proses pemberdayaan pelaku utama perikanan di lapangan, sehingga dapat membentuk masyarakat perikanan yang tanggap akan perkembangan informasi dan teknologi serta mampu meningkatkan pendapatannya dan menyejahterakan kehidupan diri dan keluarganya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan, menyebutkan bahwa penyuluhan perikanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sementara jika melihat Pasal 4 (empat) UU No. 16 Tahun 2006, fungsi sistem penyuluhan meliputi:

1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
4. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
6. Menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;
7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Sebagai agen perubahan, penyuluh perikanan harus mengikat peranannya pada tiga fungsi transformasi, yaitu transformasi teknologi, transformasi sosial, dan transformasi ekonomi (Yulianty, 2020). Sebagai agen transformasi teknologi, penyuluh perikanan harus mampu menjadikan teknologi yang ada atau yang direkomendasikan oleh pemerintah menjadi suatu teknologi yang bisa diaplikasikan ke masyarakat. Dengan teknologi itu melalui peran penyuluh perikanan diharapkan masyarakat akan menjadi tahu, mau, dan mampu atau yang tidak terampil menjadi terampil dalam mengaplikasikannya.

Transformasi sosial berkaitan erat dengan sikap dan mentalitas masyarakat di mana penyuluh perikanan mampu mengedukasi masyarakat pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan untuk memiliki mentalitas pebisnis dan wirausaha, tidak hanya sekedar hobi atau keisengan semata. Sementara sebagai agen transformasi ekonomi, penyuluh perikanan memiliki tugas memberikan edukasi bahwa sektor perikanan pun bisa diandalkan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Yulianty, 2020).

Selain itu, penyuluh perikanan juga menjadi agen pemerintah dan satu-satunya pengaman kebijakan secara teknis yang menyolisasikan dan membimbing berjalannya program pemerintah di masyarakat. Seperti dijelaskan pada fungsi penyuluhan di atas, penyuluh perikanan harus bisa menjadi *problem solver* permasalahan-permasalahan baik teknis maupun administrasi yang dihadapi oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan. Peran penyuluh perikanan begitu strategis karena keberadaannya di tengah masyarakat menjadi ujung tombak dan wakil kehadiran pemerintah.

Keberhasilan kegiatan penyuluhan dapat dilihat dari proses adopsi inovasi oleh masyarakat perikanan yang kita bina. Proses adopsi inovasi tersebut dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi atau perubahan perilaku kearah yang lebih baik berupa perubahan, sikap (*affective*), keterampilan (*psychomotoric*), maupun pengetahuan (*cognitive*) pada masyarakat yang telah menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh.

Adapun tahapan-tahapan adopsi yaitu : 1). Tahap kesadaran atau penghayatan (*awareness stage*), tahap di mana sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan penyuluh; 2). Tahap minat atau ketertarikan (*interest stage*), tahap di mana sasaran mulai ingin mengetahui lebih banyak perihal yang baru tersebut. Mereka menginginkan keterangan-keterangan yang lebih terperinci lagi; 3). Tahap penilaian (*evaluation stage*), tahap di mana sasaran berpikir dan menilai keterangan-keterangan perihal yang baru tersebut. Ia juga mulai menghubungkan hal baru tersebut dengan keadaannya sendiri. Pertimbangan-pertimbangan atau penilaian terhadap inovasi dapat dilakukan dari tiga segi yaitu teknis, ekonomis, dan sosiologi; 4). Tahap percobaan (*trial Stage*), tahap di mana sasaran sudah mulai mencoba dalam skala besar atau kecil saja; dan 5). Tahap penerimaan (*adoption Stage*), tahap di mana sasaran sudah yakin akan kebenaran atau keunggulan hal baru tersebut, maka ia akan menerapkan anjuran yang sudah disampaikan. (Indah K, 2013).

Menjadi Tenaga Penyuluh Perikanan Bantu, Ayu Cintai Pekerjaannya karena Ingin Berbagi Pengetahuan

(Tribunews-Selasa, 25 februari 2020)



Sekadau - Menjadi Penyuluh Perikanan Bantu di Kecamatan Sekadau Hilir Ayu Andira (27) sebut sebagai kecintaan terhadap pekerjaan, Selasa (25/2/2020). Ayu merupakan satu diantara 4 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPL), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau.

Dirinya sudah menjadi tenaga kontrak yang mendapat SK resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sejak tahun 2016 silam. Selama kurang lebih 4 tahun mengabdikan sebagai tenaga kontrak, Ayu tak pernah mengeluhkan pekerjaannya yang notabene lebih banyak turun ke lapangan. Ayu yang menjadi tenaga PPL di kecamatan Sekadau Hilir, memiliki tanggung jawab kepada 17 desa binaanya.

Dari 17 desa itu terdapat 11 kelompok yang beranggotakan 10 orang yang harus ia bina. Koperasi sebanyak 21 orang dan peternak individu sebanyak 7 orang. Dengan banyaknya anggota binaan yang menjadi tanggung jawabnya, Ayu memutuskan untuk mengunjungi setiap kelompok binaanya pada sore hari.

“Biasanya saya buat pertemuan 2 Minggu sekali. Tapi karena sudah biasa di lapangan, kita setiap hari mengunjungi kelompok binaan dan diselingi memberikan penyuluhan ke desa-desa,” kata Ayu.

Meski sudah menjadi tenaga PPL selama 4 tahun, Ayu dan rekan-rekannya belum juga memiliki kesempatan untuk menjadi tenaga PPL PNS. Padahal jika dilihat di Provinsi Kalbar, dari 14 Kabupaten/Kota hanya di Sekadau yang tidak ada penyuluh perikanan PNS.

“Di Sekadau cuma kami berempat tenaga PPL, ya berharap empat orang ini bisa diangkatlah.”

“Harapannya Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat nasibnya penyuluh perikanan bantu,” ungkapnya.

Menurut Ayu, tenaga PPL merupakan ujung tombak perikanan di daerah-daerah. Karena jika tidak ada tenaga PPL, maka kelompok masyarakat juga tidak memiliki pembina.

Meski begitu Ibu satu anak itu menyebut kecintaannya untuk berbagi pengetahuan dan manfaat bagi orang banyak adalah alasan utama ia tetap bertahan menjadi penyuluh perikanan bantu. (*)

BAB II

PENYULUH PERIKANAN DI ERA MASYARAKAT DIGITAL

Penyuluh memegang peranan penting dalam kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, penyuluh harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan bertransformasi menjadi penyuluh perikanan milenial. Menurut Kepala BRSDM Sjarief Widjaja, seluruh penyuluh perikanan harus memiliki tiga karakteristik utama yakni *enlightening* (mencerahkan), *enrichment* (memperkaya), dan *empowerment* (memberdayakan). Dalam aspek *enlightening*, menurut Sjarief, penyuluh perikanan harus memiliki kemampuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat serta dapat mengubah perilaku dan sikap pelaku utama dari tidak tahu menjadi tahu. Sementara pada aspek *enrichment*, penyuluh perikanan diminta untuk dapat mengubah perilaku dan sikap pelaku utama dari tidak mau menjadi mau. Dan, pada aspek *empowerment*, penyuluh perikanan diminta untuk dapat memberdayakan masyarakat dari tidak mampu menjadi mampu dan menginisiasi untuk menciptakan sesuatu dalam rangka mengubah hidup pelaku utama dan pelaku usaha.

Selain itu, menurut Sjarief penyuluh harus memiliki upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha. Karenanya, penyuluh perikanan juga harus memiliki tiga komponen utama, yakni *pengetahuan (knowledge)*, *keterampilan (skill)*, dan *sikap (attitude)*. Karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatukan antara aspek riset dan sumber daya manusia pada BRSDM agar ilmu yang didapat semuanya berasal dari hasil riset terbaru.

2.1 Masyarakat Digital

Penyuluh perikanan saat ini berada di era Revolusi Industri 4.0 di mana salah satu cirinya adalah perkembangan teknologi informasi yang cepat dan pesat. Pola hidup masyarakat di era ini berubah dari konvensional menjadi masyarakat digital (*digital society*). Castells (2004) menggunakan istilah masyarakat jejaring (*network society*). Menurutnya, masyarakat jejaring adalah masyarakat yang struktur sosialnya adalah jaringan berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Masyarakat jejaring ini sangat paham dan mahir dalam penggunaan teknologi digital yang dianggapnya sebagai alat bantu efisiensi dan produktivitas manusia.

Bagi Castells, kemajuan teknologi informasi telah menyediakan materi dasar bagi perluasan *pervasive* dari apa yang disebut bentuk jejaring sosial. Perluasan *pervasive* merupakan suatu bentuk di mana teknologi telah menyatu terhadap pengguna teknologi itu sendiri dan lingkungannya. Sehingga teknologi dianggap bukan lagi merupakan suatu hal yang khusus. Bisa dikatakan teknologi tersebut sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Misalnya penggunaan ponsel pintar (*smartphone*) oleh seseorang untuk aktivitasnya sehari-hari. Sehingga muncul kelakar jika masyarakat digital lebih gelisah saat ponsel pintarnya tertinggal ketimbang tak membawa dompet.

Dalam pandangan Castells, teknologi dan aliran informasi telah mengubah dunia bahkan hingga menimbulkan permasalahan pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Castells juga memperkenalkan istilah “informasionalisme”, yaitu suatu mode perkembangan di mana sumber utama produktivitas terletak pada optimalisasi kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi berbasis pengetahuan dan informasi, tidak hanya berdasarkan pada kekuatan modal. Menurut Castells, penerapan pengetahuan (*knowledge*) dan informasi

menghasilkan suatu proses inovasi teknik yang bersifat akumulatif dan sangat berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial. Castells menyebut perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi sebagai masyarakat jaringan.

Menurut Castells, dengan adanya jaringan (*network*) memungkinkan komunikasi berjalan ke semua arah dan pada level manapun, tanpa perlu diwakilkan. Produktivitas dan efisiensi kerja organisasi/ institusi juga disebut akan semakin berkembang pesat dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan jaringan informasi ini. Dengan adanya jaringan, maka sudah sepatutnya pemberdayaan masyarakat informasi dapat dilakukan ke semua lapisan masyarakat, pada level struktur mana saja, di manapun dan kapanpun. Dengan adanya jaringan setiap individu berhubungan satu sama lain, saling terbuka, mampu berkembang, dinamis, dan mampu bergerak ke arah yang lebih baik. Karena itu jaringan menjadi sangat penting.



“ *Masyarakat digital identik dengan istilah masyarakat milenial, yaitu masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi digital, sangat memahami perkembangan teknologi tersebut, dan menginginkan segalanya berjalan dengan serba cepat.* ”

Castells berpandangan bahwa melalui teknologi, sebuah informasi harus tersebar luas dan dapat diakses oleh siapa saja. Lebih jauh lagi, melalui teknologi digital pula manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan manusia lain, tanpa terbatas pada tempat dan waktu. Manusia bisa mencari dan menemukan informasi yang diinginkan sesuai kebutuhan dimana pun dan kapan pun. Dengan demikian dapat disimpulkan jika masyarakat digital identik dengan kebiasaan berinteraksi melalui media baru dan metode baru. Media digital memungkinkan orang-orang dari kelompok-kelompok kecil berkumpul secara *online*, berbagi, menjual, dan menukar barang serta informasi. Dalam berkomunikasi dan berinteraksi, masyarakat digital tidak hanya bertatap muka, hadir secara fisik seperti masa lalu, namun melakukannya secara virtual melalui media sosial bernama WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan sejenisnya atau sering disebut media dalam jaringan (daring).

Menurut Widjaja (2019), masyarakat digital identik dengan istilah masyarakat milenial. Yaitu masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi digital dan sangat memahami perkembangan teknologi tersebut yang menginginkan segalanya berjalan dengan serba cepat. Ini merupakan sebuah tantangan di mana penyuluh perikanan dituntut untuk mengikuti arus era milenial untuk dapat berkembang. Berbagai inovasi digital yang berkembang dapat mendukung penyuluh agar para nelayan mendapatkan informasi dan teknis pengembangan usaha perikanan dengan baik.

2.2 Strategi Digitalisasi Penyuluh Lewat E-Penyuluh

Segala macam strategi telah dimiliki BRSDM guna menjadikan penyuluh perikanan lebih berwawasan di tengah-tengah era masyarakat digital untuk mendukung semangat KKP dalam membentuk SDM kelautan dan perikanan yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Sebagaimana juga tercantum dalam Program Prioritas KKP 2020-2024, peningkatan mutu sumber daya manusia akan ditempuh melalui pendidikan vokasi berbasis *entrepreneurship*, pelatihan teknis untuk masyarakat, sertifikasi kompetensi pelaku utama, digitalisasi pelatihan dan penyuluh, serta hilirisasi hasil inovasi dan riset.

Berikut tutorial cara penggunaan Aplikasi e-Penyuluh:

1. Penyuluh mengisi e-Penyuluh secara online pada laman bit.ly/e-penyuluhkkp
2. Penyuluh perikanan melakukan registrasi dengan mengisi penugasan wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan upload file SK (tutorial pendaftaran).
3. Penyuluh perikanan melakukan input laporan sesuai modul e-Penyuluh dengan melampirkan upload bukti kegiatan penyuluhan di lapangan (tutorial penginputan).
4. Selesai



Di bidang penyuluhan, salah satunya adalah dengan meluncurkan aplikasi E-Penyuluh. Sistem aplikasi modul ini digunakan sebagai alat bantu terukur berbasis *web* dan *mobile* dalam pelaksanaan layanan penyuluhan di lapangan, sehingga penyuluh dapat melaporkan hasil kinerjanya tanpa harus datang ke kantor. Sistem ini memiliki berbagai keunggulan dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran penyuluh perikanan. Hasil kegiatan penyuluh perikanan, salah satunya, dapat dimasukkan langsung dalam modul e-Penyuluh yang telah dipasang di telepon seluler. Selain itu, modul e-Penyuluh dapat dibuka dan dimasukkan secara *offline*, tidak tergantung jaringan internet.

Di samping itu, modul e-Penyuluh terintegrasi dengan modul Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dan pendataan produksi. Kegiatan pendataan pun dapat dilakukan pada perangkat telepon yang sama. Kehadiran penyuluh perikanan juga tercatat sesuai waktu masuk saat mengisi informasi kegiatan dan waktu keluar saat selesai melakukan kegiatan.

2.3 Mendorong Sinergi bersama Pemerintah Daerah

Mendorong kegiatan penyuluhan perikanan berbasis digital membutuhkan banyak dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui BRSDM terus mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk bersinergi bersama. Sinergi dibutuhkan untuk mempercepat akselerasi kegiatan penyuluhan di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, tak dipungkiri bahwa jumlah penyuluh perikanan masih terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah Indonesia. Untuk mencakup semua wilayah kerja penyuluh perikanan, KKP melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) mengembangkan aplikasi penyuluhan yang mapan. Di mana berbagai materi penyuluhan dan pelatihan juga akan diunggah dalam aplikasi sehingga dapat disebarluaskan dengan mudah secara daring kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas.

Selain itu, berbagai kegiatan penyuluhan juga akan dilakukan secara terpusat dalam sebuah aplikasi ini. Mulai dari absensi, program, hingga laporan penyuluh. Berbagai data yang di-*input* ini kemudian akan menghitung capaian, perhitungan, hingga tunjangan kinerja para penyuluh secara otomatis. Widjaja (2020) menyebut jika pola-pola seperti ini harus dikembangkan karena akan menjadi tren ke depan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk memenuhi segala sarana dan prasarana menuju proses tersebut. Salah satunya adalah pembangunan *call center* mini yang akan menyediakan beberapa ahli yang dapat menjawab segala pertanyaan dan kebutuhan para penyuluh di lapangan. Widjaja (2020) menyebut para ahli ini akan memberikan saran kepada para penyuluh bila ada permasalahan. Untuk itu, sudah seyakinya para penyuluh di lapangan memperkaya pengetahuannya dengan wawasan dari hulu ke hilir sehingga dapat mengaitkan kebutuhan berbagai kelompok di daerahnya.

Alasan KKP Penyuluh Perikanan agar Ikuti Arus Era Milenial

(Antara, Selasa, 3 September 2019)



Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, penyuluh perikanan yang ditempatkan di berbagai daerah juga perlu mengikuti arus era milenial dalam menyampaikan penyuluhannya agar sesuai dengan konsep industri 4.0 yang selama ini dicanangkan pemerintah.

“Seluruh penyuluh perikanan harus memiliki tiga karakteristik utama yakni enlightening (mencerahkan), enrichment (memperkaya) dan empowerment (memberdayakan). Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, sistem penyuluh perikanan dituntut untuk mengikuti arus era milenial untuk dapat berkembang,” kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Menurut Sjarief Widjaja, salah satu ciri era milenial dan industri 4.0 adalah penggunaan digitalisasi, sedangkan berbagai inovasi digital yang berkembang pada saat ini dinilai dapat mendukung penyuluh agar para nelayan mendapatkan informasi dan teknis pengembangan usaha perikanan nasional dengan baik.

Ia mengemukakan, penyuluh perikanan harus memiliki kemampuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat serta dapat mengubah perilaku dan sikap pelaku utama dari tidak tahu menjadi tahu.

Selain itu, ujar dia, penyuluh juga diharapkan untuk dapat mengubah perilaku dan sikap pelaku utama dari tidak mau menjadi mau, serta dapat memberdayakan masyarakat dari tidak mampu menjadi mampu dan menginisiasi untuk menciptakan sesuatu dalam rangka mengubah hidup pelaku utama dan pelaku usaha.

“Penyuluh harus memiliki upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha. Karenanya, penyuluh perikanan juga harus memiliki tiga komponen utama yakni *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keahlian), dan *attitude* (sikap). Itulah mengapa KKP menyatukan antara *research and human resources* pada BRSDM,” katanya.

Dengan demikian, lanjut Kepala BRSDM KKP, berbagai ilmu yang didapat oleh kalangan penyuluh juga semuanya berasal dari hasil riset terbarukan.

Sjarief juga mendorong seluruh penyuluh perikanan untuk membangun paradigma menjadi penyuluh perikanan milenial. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Juli 2019, KKP diketahui memiliki sebanyak 2.916 Penyuluh Perikanan PNS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris BRSDM Maman Hermawan menuturkan bahwa penyuluh perikanan merupakan ujung tombak program KKP di masyarakat.

“Pejabat fungsional penyuluh perikanan memiliki peran yang sangat penting dan dituntut dalam kinerja organisasi baik langsung dan tidak langsung di tingkat pusat dan daerah secara riil, dengan tidak mengesampingkan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota,” ujar Maman Hermawan.

Pihaknya juga mengutarakan harapannya agar momentum UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat menjadi spirit kerja yang dilandasi etos kerja tinggi bagi penyuluh perikanan PNS untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, bertanggung jawab, jujur, profesional, serta ikhlas dalam pengabdian, serta mampu berkompetisi dalam era persaingan global sebagai talenta unggul dengan inovasi dan kreativitas berpikir.

BAB III

INOVASI PENYULUHAN PERIKANAN DIGITAL

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di Indonesia sejak meluasnya pandemi Covid-19 secara langsung sangat berdampak pada pergerakan sektor ekonomi, terutama sektor perdagangan dan perindustrian. Sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan karena rendahnya nilai daya beli dan daya jual dari masyarakat. Tak terkecuali di sektor perikanan yang dampaknya dirasakan terutama oleh para pelaku utama perikanan seperti pembudidaya, pengolah dan pemasar, nelayan baik nelayan laut atau nelayan daratan. Seperti halnya yang dirasakan oleh pelaku utama sektor perikanan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Sejak PSBB mulai diberlakukan di kabupaten ini, para pelaku usaha perikanan, misalnya, dihadapkan pada berbagai macam persoalan, seperti stok ikan yang melimpah tidak bisa terjual, sepiunya pembeli produk olahan perikanan sampai pada permasalahan macetnya proses distribusi produk perikanan karena adanya larangan keluar dari wilayah Banyumas (Yulianty, 2020). Berbagai permasalahan tersebut tentunya harus diatasi agar roda perekonomian sektor perikanan, khususnya, terus bergulir. Menurut Yulianty (2020), kondisi ini menuntut kinerja dari penyuluh perikanan Kabupaten Banyumas untuk menyikapi dan menyelesaikannya secara 3T yaitu Tepat, Tuntas, dan Teliti. Para

penyuluh perikanan di Banyumas harus memutar otak menyusun strategi agar penyuluhan perikanan yang dilaksanakan berhasil namun tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Solusi yang ditawarkan kemudian adalah menjadi Penyuluh Perikanan Daring yang JENIUS. Daring dalam arti sebenarnya (harfiah), namun dalam konteks ini memiliki arti “Dalam Jaringan” dan “Sadar Lingkungan”. Maksudnya, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini para penyuluh perikanan harus memiliki strategi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungannya (Yulianty, 2020). Kegiatan-kegiatan penyuluhan perikanan dalam konsep sadar lingkungan di tengah wabah Pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku seperti penggunaan masker, sarung tangan dan *face shield*, rajin mencuci tangan dengan *hand soap* atau *hand sanitizier*, jaga jarak aman minimal 1 meter, dan dilarang berkerumun atau bergerombol lebih dari 10 orang.

Sedangkan “JENIUS” yang secara harfiah memiliki arti berkemampuan (berbakat) luar biasa dalam berpikir dan mencipta, dalam konteks ini merupakan singkatan dari Jeli, Empati, Nuntun, Inisiatif, Ulung/Unggul dan Semangat. Penyuluh Perikanan memang harus jenius, mampu berpikir cepat dan menemukan solusi secara cepat dari permasalahan binaan- binaannya (Yulianty, 2020). Dua konsep ini kemudian diterapkan oleh para penyuluh perikanan di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Rawalo, dan Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

3.1 Strategi Penyuluhan “DARING” di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 memaksa kegiatan penyuluhan perikanan di Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Tirta Jaya IV, Desa Losari, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas tersendat. Apalagi terdapat larangan berkerumun dari Pemkab Banyumas juga karena jarak menuju lokasi Pokdakan adalah sejauh 60 km dari pusat kota Purwokerto. Meskipun demikian, tanggung jawab para penyuluh untuk mendampingi dan menyuluh pelaku utama dan pelaku usaha harus tetap dilaksanakan. Karena itu, strategi DARING menjadi pilihan bagi para penyuluh di Banyumas. Strategi DARING adalah strategi untuk mengajak masyarakat perikanan melekat teknologi. Yaitu teknologi dalam jaringan yang merupakan adaptasi perilaku ketika penyuluhan perikanan tidak bisa dilakukan seperti keadaan

“ *Solusi yang ditawarkan kemudian adalah menjadi Penyuluh Perikanan Daring yang JENIUS. Daring dalam arti sebenarnya (harfiah), namun dalam konteks ini memiliki arti “Dalam Jaringan” dan “Sadar Lingkungan”.* ”

normal, karena beresiko tinggi baik kepada penyuluh perikanan itu sendiri maupun pelaku perikanan yang dibina. Strategi DARING dijalankan para penyuluh perikanan di Banyumas melalui media jejaring Whatsapp Group (WaG) kelompok perikanan, Facebook, Instagram, Twitter, Blog, dan lain- lainnya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat binaannya. Pembagian materi-materi penyuluhan terkait teknis budidaya disampaikan dan disebarluaskan melalui WaG Kelompok (Yulianty, 2020).

Sehingga resiko tinggi jika dilakukan kegiatan penyuluhan perikanan secara langsung pada masa Pandemi Covid-19. Selain melalui pendekatan WaG Kelompok, bisa juga dilakukan pendekatan perseorangan melalui *WhatsApp* individu sesuai kebutuhan mereka masing-masing baik terkait permasalahan teknis perikanan, pemasaran, permodalan, sampai pada masalah kesehatan ikan.

3.2 Penyuluh JENIUS, Masyarakat Sejahtera

Jika strategi DARING lebih mengoptimalkan teknis penyuluhan melalui penggunaan teknologi digital, maka konsep JENIUS menuntut para penyuluh perikanan untuk lebih meningkatkan kapabilitas dan kualitasnya dengan mengangkat sisi-sisi psikologis dan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat binaan. JENIUS merupakan singkatan dari Jeli, Empati, Nuntun, Inisiatif, Unggul, dan Semangat.

Jeli berarti penyuluh perikanan harus pandai dalam melihat peluang atau potensi yang ada untuk berkembangnya kelompok-kelompok perikanan binaannya terutama pada peningkatan produksi yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraannya, (Yulianty, 2020). Ketika ketersediaan induk unggul berkualitas dan harga pakan ikan melambung yang menjadi masalah masyarakat binaan, penyuluh perikanan Banyumas jeli melihat peluang kerjasama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi sebagai produsen induk ikan unggul berkualitas dan BBPBAP Jepara sebagai produsen pakan ikan.

Empati yang secara harfiah merupakan wujud kepedulian kepada sesama manusia harus menjadi sifat dasar penyuluh perikanan, apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Penyuluh Perikanan dituntut untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pelaku utama/pelaku usaha perikanan (Yulianty, 2020). Contoh, berkurangnya modal akibat masalah gagal panen yang merupakan dampak dari pemberlakuan PSBB di Banyumas menuntut penyuluh perikanan memberikan solusinya. Antara lain menyosialisasikan dan memfasilitasi akses permodalan tentang akses permodalan bahkan mempertemukan langsung dengan perbankan. LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) yang memberikan akses permodalan kepada pelaku utama/pelaku usaha kelautan dan perikanan.



Penyuluh perikanan juga dituntut untuk bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku utama/pelaku usaha binaannya (Yulianty, 2020). Contoh, para penyuluh perikanan di Banyumas pernah mendapatkan pengaduan masalah terkait kematian ikan gurami di Pokdakan Mina Teratai, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat. Selanjutnya tindakan yang diambil penyuluh yaitu mengunjungi lapangan untuk melihat kondisi secara langsung. Penyuluh perikanan langsung memfasilitasi Pokdakan Mina Teratai untuk berkonsultasi secara langsung dengan Tim Posikandu (Pos Kesehatan Ikan Terpadu) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas yang berada di lokasi Balai Benih Ikan (BBI) Pandak – Baturaden. Solusi yang didapatkan yaitu pemberian Vitamin C, Probiotik, dan Infrofloxx lengkap dengan panduan pemakaiannya dari petugas Posikandu yang mumpuni dan handal di bidang penanganan Hama dan Penyakit Ikan (Yulianty, 2020).

Apresiasi tinggi diberikan kepada para penyuluh karena telah memiliki salah satu kemampuan dasar seorang penyuluh, yaitu sebagai *problem solver*. Dengan kemampuan ini penyuluh tak akan lagi dicibir sebagai sekelompok orang yang hanya pintar teori namun minim pengetahuan tentang permasalahan di lapangan.

Selanjutnya, penyuluh perikanan yang memiliki inisiatif adalah penyuluh perikanan yang berani mengambil langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu, (Yulianty, 2020). Seperti saat menghadapi permasalahan ketika salah satu pelaku usaha pedagang ikan anggota Poklhasr Mina Aji Desa Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang mengalami kesulitan mencari ketersediaan stok ikan konsumsi untuk dijual di Pasar Ikan. Para penyuluh perikanan di Banyumas kemudian berinisiatif mencarikan pasokan ikan nila dari luar wilayah Kecamatan Ajibarang, tepatnya dari pembudidaya ikan nila di wilayah Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran.

Seorang penyuluh perikanan harus unggul dalam memahami semua aspek perikanan, baik teknis maupun non teknis. Seperti tentang budidaya, pengolahan, pemasaran, hingga penangkapan. Hal ini juga sekaligus untuk menjawab stigma buruk yang selama ini beredar di masyarakat. Tak bisa menutup mata selama ini beredar anggapan jika penyuluh kerap kali dianggap tidak lebih pintar dari yang dibinanya. Bagaimana agar menjadi penyuluh unggul? Tentunya

melalui program memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan serta praktik di lapangan. Sehingga istilah sindiran “*Penyuluh mung bisa Jarkoni Bisa Ujar Ora Bisa Nglakoni*” (penyuluh cuma bisa ngomong, tak bisa melaksanakan) tak lagi terdengar.

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan juga terus mendorong peningkatan kapabilitas para penyuluh perikanan, antara lain melalui penyediaan berbagai macam Diklat *online* melalui *platform e-Milea*, berbagai webinar dan seminar, dan berbagai macam Diklat lainnya. Perlu diingat bahwa keberadaan penyuluh perikanan dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi masyarakat. Selain itu juga membantu masyarakat membentuk budaya pengelolaan usaha yang lebih baik untuk menuju kesejahteraan. Agar dapat menjalankan peran dengan baik, menurut Kepala BRSDM Sjarief Widjaja, penyuluh perikanan harus aktif mencari informasi seluas-luasnya dari berbagai sumber. Informasi yang bermanfaat dapat diperoleh dari mana saja, Google, media cetak, elektronik, dan lainnya. Setelah dikumpulkan, harus dilakukan suatu proses pencernaan informasi menjadi sebuah pengetahuan dan keterampilan yang dapat diserap dengan mudah oleh masyarakat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat tentunya harus informasi yang dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Terakhir penjabaran kata JENIUS, adalah sikap semangat yang menjadi kunci dasar terselenggaranya penyuluhan dengan baik

“*Tentunya melalui program memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan serta praktik di lapangan. Sehingga istilah sindiran “Penyuluh mung bisa Jarkoni Bisa Ujar Ora Bisa Nglakoni” (penyuluh cuma bisa ngomong, tak bisa melaksanakan) tak lagi terdengar.*



di masyarakat. Semangat bisa juga diartikan sebagai *passion* atau gairah. Sebuah pekerjaan yang dikerjakan dengan *passion* tinggi akan menyenangkan. Penyuluh perikanan dituntut untuk memiliki semangat menjadi penyuluh perikanan, semangat mengabdikan, dan semangat menjadi ujung tombak pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

3.3 Mengubah Keterbatasan jadi Kesuksesan

Kehidupan di Era Normal Baru atau *New Normal* yang mulai dijalani selama pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia secara langsung telah mengubah pola hidup masyarakat Indonesia. Baik pola dalam bekerja maupun bersosialisasi. Tak terkecuali pada kegiatan penyuluhan perikanan. Tiga bulan pasca penetapan PSBB, Kepala BRSDM Sjarief Widjaja menginstruksikan kepada para penyuluh perikanan terkait tiga fokus utama penyuluh perikanan di masa *new normal* ini. Yaitu kesehatan, peningkatan produksi, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sjarief, terkait produksi, target bukan lagi berorientasi pada jumlah (kuantitas), melainkan tingkat produktivitas.

Sjarief juga meminta penyuluh perikanan untuk sedikit menggeser pola kerja dengan kelompok binaan. Para penyuluh



diminta untuk mulai memperkenalkan sistem pembinaan digital melalui *video conference* bagi masyarakat binaan. Penyuluh perikanan juga diimbau untuk mengurangi kunjungan langsung ke lapangan dan fokus membina kelompok yang sudah ada, tanpa perlu memaksakan pembentukan kelompok baru. Dalam perjalanannya, masa *new normal* yang menjadi tantangan ini telah melahirkan berbagai macam inovasi dari para penyuluh perikanan. Seperti yang dilakukan oleh para penyuluh perikanan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Semua berawal ketika selama masa PSBB banyak produk perikanan yang tak dapat terdistribusi ke konsumen luar daerah akibat pembatasan akses keluar masuk baik di Kabupaten Berau dan daerah tujuan. Menurut Andi Trisnawati, Satminkal BPPP Tegal, di beberapa wilayah gerbang ekspor seperti Tarakan, Jakarta, dan Surabaya, dilakukan penutupan akses yang berakibat pengiriman produk terhambat. Sementara dalam mata rantai bisnis salah satu elemen yang paling vital adalah pemasaran. Abidin (2017) mendefinisikan pemasaran sebagai penuntutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu komoditi dari titik produsen ke konsumen. Dalam pengertian tersebut mengandung setidaknya tiga hal penting yaitu jasa, titik produsen, dan titik konsumen.

Terhambatnya kegiatan pemasaran konvensional tentu menjadi tantangan tersendiri. Penyuluh perikanan sebagai *problem solver*

tentu harus mencari jalan membantu pelaku utama dan pelaku usaha keluae dari masalah tersebut. Dan solusi yang ditawarkan kemudian adalah konsep IKANKU FRESH (*Friendly*, Ekonomis, Sehat, dan Higienis) (Trisnawati, 2020). Konsep ini selain mengedepankan teknik pemasaran digital atau *online* juga untuk menyosialisasikan gaya hidup konsumsi ikan yang bersih, segar, dan sehat. Menurut Trisnawati, ketelusuran produk hasil perikanan perlu diketahui konsumen. Pasalnya, selama tidak semua konsumen mengetahui dan memahami jenis ikan yang sehat, higienis, dan layak untuk dikonsumsi karena ikan-ikan tersebut telah melalui serangkaian tahapan perlakuan yang bisa mengecoh konsumen (Trisnawati, 2020). Karenanya seorang penyuluh perikanan, menurut Trisnawati, merasa perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga yang menjadi konsumen utama dalam pembelian ikan.

Program sosialisasi di masa pandemi kemudian bisa dilakukan melalui sosial media, baik Whatsapp Group, Facebook, dan Instagram. Leilani *et al.* (2015) menyebut pemilihan penggunaan media penyuluhan merupakan faktor yang mutlak diperlukan karena mampu mempengaruhi efektivitas kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Sebagai contoh, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat merupakan hasil suatu proses pembelajaran dalam kegiatan penyuluhan, dimana keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan media.

Hal ini tentunya sejalan dengan program digitalisasi penyuluhan perikanan untuk mendukung penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan inovasi riset kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Bangun SDM Perikanan, KKP Sosialisasikan Inovasi e-Penyuluh

(Investor.id, Rabu 15 Januari 2020)



Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) terus berupaya untuk mewujudkan prioritas utama Presiden Joko Widodo yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas KKP 2020-2024, peningkatan mutu sumber daya manusia dengan pendidikan vokasi berbasis entrepreneurship, pelatihan teknis untuk masyarakat, sertifikasi kompetensi, digitalisasi pelatihan dan penyuluhan serta hilirisasi hasil inovasi dan riset harus diciptakan.

Melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDM melakukan pembinaan penyuluh perikanan tahun 2020 melalui *Video Conference* perdana pada 9 Januari 2020, sekaligus untuk mensosialisasikan sistem e-Penyuluh. Kepala BRSDM KKP Sjarief Widjaja mengatakan dalam rangka

mengembangkan Sistem Kerja *Smart Office* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), KKP terpilih menjadi salah satu pusat percontohan role model ASN bekerja secara mobile dari lapangan. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, nantinya setiap kinerja penyuluh perikanan akan dipotret melalui sistem e-Penyuluh. Melalui aplikasi ini diharapkan seluruh penyuluh perikanan mampu meningkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas di lapangan.

Sistem aplikasi modul e-Penyuluh juga digunakan sebagai alat bantu terukur berbasis Web dan Mobile dalam pelaksanaan layanan penyuluhan di lapangan sehingga penyuluh perikanan dapat melaporkan hasil kinerjanya tanpa harus datang ke kantor. Sistem e-Penyuluh memiliki berbagai keunggulan dalam rangka meningkatkan kinerja dan peran penyuluh perikanan. Hasil kegiatan penyuluh perikanan dapat dimasukkan langsung dalam modul e-Penyuluh yang telah dipasang di telepon seluler. Model e-Penyuluh dapat dibuka dan dimasukkan secara *offline* dan tidak tergantung jaringan internet. “Modul e-Penyuluh terintegrasi dengan modul dan pendataan produksi kegiatan pendataan pun dapat dilakukan dengan perangkat telepon yang sama,” ujar dia dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Rabu (15/1).

Penyuluh perikanan juga dituntut untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan kebijakan KKP di wilayah kerja masing masing, berkontribusi mengawal program KKP di tingkat lapangan terutama bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha KP. Untuk mengakses aplikasi e-Penyuluh, penyuluh perikanan harus terlebih dahulu melakukan registrasi pada laman satu data dengan mengisi penugasan wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan *upload file* SK. Langkah selanjutnya, penyuluh perikanan dapat melakukan input laporan sesuai modul e-Penyuluh dengan melampirkan upload bukti kegiatan penyuluhan di lapangan. KKP memiliki 2.600 penyuluh perikanan PNS dan 2.100 Penyuluh Perikanan Bantu untuk mendukung program prioritas nasional, peningkatan produksi serta program direktif Menteri KP.

BAB IV

BERAMAL ILMU DENGAN MENJADI PENYULUH SWADAYA

Nama Sultoni di Dusun Sorogen, Desa Menayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang cukup terkenal. Bisa dikatakan tak ada warga yang tak mengenal pria ini. Bagi warga di Dusun Sorogen, Sultoni adalah pencerah. Berkat kegigihan pria ini usaha budidaya ikan milik warga di dusun maju pesat. Sultoni merupakan Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan atau Pokdakan Ikan hias Sido Makmur. Pokdakan ini memiliki produk perikanan unggulan berupa ikan hias dan konsumsi. Ikan hias yang terdapat di lokasi tersebut adalah jenis koi dan arwana Brazil (*Osteoglossum formosus*).

Di tahun 2012, dari Pokdakan Sidomakmur memulai usaha budidaya ikan arwana. Dengan modal sekitar Rp500.000, kelompok ini membeli 10 ribu induk ikan arwana yang didapatkan dari berbagai penyedia induk di beberapa wilayah di Indonesia. Indukan tersebut kemudian dipijahkan dan benihnya dibesarkan dalam kolam tanah seluas 2 hektar khusus perbenihan, di mana satu petaknya memiliki luas sebesar 200 m².

Upaya terbilang sukses, ketika musim panen tiba, Pokdakan Sido Makmur bukan saja dapat meraup untung tapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Untuk panen arwana dibutuhkan 5 orang tenaga kerja per petak seluas 200 m² atau 25 orang per ha. Selain itu, Pokdakan juga membudidayakan ikan konsumsi. Komersialisasi usaha dan peningkatan daya saing benar-benar telah dilakukan oleh Sultoni dalam mengembangkan usahanya dan membina kelompok lainnya sebagai penyuluh perikanan swadaya.

Berkat kegigihannya tersebut, Sultoni kemudian diangkat menjadi Penyuluh Perikanan Swadaya (PPS) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Baginya, itu merupakan kehormatan karena sebagai pengakuan resmi dari pemerintah terhadap kiprahnya selama ini. Berbeda dengan penyuluh perikanan swadaya yang umumnya membina kelompok di wilayah nya atau yang berdekatan, Sultoni melanglang buana membina pokdakan di berbagai daerah. Sederet prestasi telah diraih dari pemerintah atas kiprahnya dalam usaha perikanan dan penyuluh swadaya. Berbagai piagam dari berbagai instansi dan pemerintah daerah menghiasi kantor Sekretariat Pokdakan yang juga *hatchery*. Hal ini mengindikasikan pengakuan akan kinerja, pengalaman, dan kemampuan teknis budidaya ikan air tawar baik konsumsi maupun ikan hias beliau sangat mumpuni.



4.1 Penyuluh Perikanan Swadaya (PPS) sebagai Mitra Pemerintah dan Masyarakat

KKP berupaya untuk membangkitkan kembali peran PPS yang sempat jaya di tahun 2012-2013, dalam rangka memperkuat kinerja sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air. Menurut catatan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan (Puslatluh), sepanjang kurun waktu dua tahun tersebut jumlah PPS di seluruh Indonesia mencapai 11.000 orang. Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja ingin menjadikan PPS sebagai kekuatan nasional serta motor penggerak perekonomian para pelaku utama serta perikanan di Indonesia. Ada alasan khusus mengapa KKP melalui Puslatluh ingin membangkitkan kembali peran PPS. Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun saat ini baru 10 persen saja wilayah yang sudah dimanfaatkan.

Sementara berdasarkan data per Juni 2020, KKP memiliki 4.650 orang Penyuluh Perikanan PNS dan PPB Penyuluh Perikanan Bantu (PPB). Dengan adanya penyuluh swadaya diharapkan dapat membantu memperbanyak jumlah penyuluh.

Siapakah Penyuluh Perikanan Swadaya?

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluh perikanan swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Di lapangan, umumnya PPS adalah orang yang menjadi pengurus inti kelompok atau pernah menjadi pengurus inti kelompok pelaku utama perikanan. PPS ini menjadi mitra kerjasama penyuluh perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) dalam mensinergikan berbagai kegiatan penyuluhan untuk pelaku utama perikanan. Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan mutlak memerlukan penyuluh perikanan di lapangan untuk mengawal kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (Haryadi, 2015).

Berbeda dengan penyuluh perikanan PNS, PPS umumnya tinggal dan bekerja di wilayah sesuai dengan domisilinya. Haryadi (2015) melihat jika kinerja penyuluh perikanan di lapangan menjangkau lebih dari 1 desa tempat mereka tinggal. Bahkan di beberapa lokasi ada penyuluh yang harus menjangkau lokasi penyuluhan antar kabupaten. Hal ini dikarenakan kapasitas penyuluh perikanan swadaya yang mumpuni pada komoditas tertentu.

“ *Ketika dikukuhkan menjadi PPS, Pandu adalah penggerak ekonomi perikanan berbasis budidaya di desanya.* ”

Ada beberapa faktor yang membuat seorang PPS sangat mumpuni dalam menjalankan program penyuluhan kepada kelompok binaannya. Pertama, rata-rata PPS adalah pelaku utama atau pelaku usaha perikanan yang memiliki lahan usaha dan secara teknis sudah berpengalaman dan menguasai usaha yang dijalankannya tersebut. Secara umum penyuluh perikanan swadaya mumpuni dalam teknis perikanan tertentu. Kedua, PPS adalah masyarakat lokal yang sudah mengerti karakteristik dan budaya masyarakat di daerah kerjanya. Sehingga proses komunikasi menjadi lebih lancar.

Hal-hal tersebut bisa dipelajari dari kesuksesan Pandu Sudjatmoko, PPS Penggerak Budidaya Ikan Nila Merah di Dukuh Ponggok, Desa Nganjat, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Sebelum dikukuhkan sebagai PPS oleh Puslatluh, KKP, Pandu adalah ketua Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) “Karya Mandiri” Klaten dan kepala desa Nganjat selama dua periode. Sebagai Ketua P2MKP yang fokus pada budidaya nila merah, pengalaman Pandu tak perlu diragukan lagi. Ia bahkan kerap diminta untuk memberikan pelatihan kepada berbagai Pokdakan di Klaten dan sekitarnya. Ketika dikukuhkan menjadi PPS, Pandu adalah penggerak ekonomi perikanan berbasis budidaya di desanya. Ia bersama-sama penyuluh perikanan PNS setempat bahu membahu mengembangkan budidaya ikan nila merah dengan sistem air deras.

Selain Pandu, kita juga bisa melihat kesuksesan Joko Senawi, Penyuluh Perikanan Swadaya Penggerak Produksi Garam Rakyat di Kabupaten Pati. Ia merupakan PPS yang mengimplementasikan teknologi ulir filter dan mendorong masyarakat sekitarnya mencoba dan mengadopsi inovasi ini. Berkat kiprahnya memajukan industri garam rakyat Pati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadikan Pati sebagai *role model* pengelolaan tambak dan produksi garam rakyat di Jawa Tengah.



Prestasi luar biasa juga ditorehkan oleh Saptono, PPS penggerak usaha pembenihan dan pembesaran Ikan air tawar Kelompok Mino Ngremboko, di Dusun Bokesan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Dengan kegigihannya, Saptono yang juga pelaku usaha ikan mampu mampu ‘menyulap’ Dusun Bokesan yang dulunya tandus menjadi sentra produksi ikan nila merah terbesar di Jawa Tengah. Omzet yang diraih pembudidaya di Bokesan mencapai Rp 11 miliar per tahun. Di tahun 2018, Dusun Bokesan bahkan dikukuhkan sebagai Kampung Nila oleh Pemerintah kabupaten Sleman.

4.2 PPS adalah Tugas Mulia

BMelalui Surat Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 88/KEPBRSDM/2020 tentang Penetapan Penyuluh Perikanan Swadaya pada tanggal 2 Juli 2020, BRSDM KP telah mengukuhkan sebanyak 421 PPS dari seluruh wilayah Indonesia. Para penyuluh ini berasal dari 70 kabupaten/kota di 18 provinsi yang tersebar di wilayah Indonesia. Mayoritas penyuluh memiliki keahlian di sektor budidaya, pengolahan, penangkapan, garam, dan kerajinan berbahan baku sumber daya laut. Penyerahan Surat Keputusan (SK) secara simbolis dilakukan oleh Kepala BRSDM Sjarief Widjaja kepada perwakilan PPS Kabupaten Tangerang Selatan, Sri Sulastri, dan PPS Kab. Bekasi, Didi Supendi.

Berawal dari Lahan Tandus, Kampung Nila Bokesan Beromzet Rp 17,6 Milyar

(Tribunjogja.com, 29 November 2018)



Jogja - Dusun Bokesan di Sindumartani, Ngemplak, Sleman resmi ditetapkan sebagai Kampung Nila pada Kamis (29/11/2018). Peresmian langsung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3).

Menurut Kepala DP3 Sleman Heru Saptono, dengan penetapan ini, citra Dusun Bokesan semakin terangkat ke publik. “Nantinya akan kita integrasikan dengan sektor pariwisata,” ujar Heru usai peresmian. Lingkungan sekitar Dusun Bokesan sendiri memang banyak ditemui kolam-kolam ikan. Seluruhnya dikelola oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (KPI) Mino Ngremboko.

Namun, siapa sangka bahwa dulunya lokasi kolam tersebut hanya berupa lahan tandus tak terawat. Hal tersebut dituturkan oleh Saptono, Ketua Kelompok Mino Ngremboko. “Perikanannya mulai berkembang sekitar tahun 1970-an, kemudian diperkuat dengan SK Bupati pada Maret 1988,” jelas Saptono.

Saat ini, KPI Mino Ngremboko meningkat statusnya sebagai Kelas Utama. Status tersebut didapat pada 2013 silam. Saptono menjelaskan, kelompoknya terdiri dari 60 anggota. Lahan yang digunakan untuk budidaya ikan total luasannya mencapai 30 hektar. Tiap anggota mengelola kolamnya masing-masing.

Mino Ngremboko ternyata berkiprah cukup lama di dunia perikanan. Terbukti dari sederet prestasi yang didapat. Penghargaan tingkat nasional pun juga mampu diraih. Berkat prestasi tersebut, KPI Mino Ngremboko juga semakin dikenal dan menjadi pemasok untuk ikan nila merah. Pasarnya pun sudah di tingkat nasional. “Biasanya kita kirim lewat kargo ke Sumatera, Kalimantan hingga Papua,” jelas Saptono.

Pria berkacamata ini menyebutkan, ikan nila dari Mino Ngremboko dihargai sekitar Rp 27 ribu per kilogram. Penjualannya pun hanya dilakukan di pasar, dengan alasan untuk keseimbangan harga dan efisiensi.

Meskipun demikian, kelompok ini mampu meraup omzet milyaran Rupiah. Saptono menyebut bahwa per tahunnya bisa mencapai omzet hingga Rp 14 Milyar. “Puncaknya sekitar 2015-2016 omzet kita berhasil mencapai angka Rp 17,6 milyar,” ungkap Saptono.

Ikan Nila Merah dipilih oleh Mino Ngremboko lantaran permintaan konsumen dan pasar masih tinggi. Harganya pun cenderung stabil. Selain itu, ikan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. “Jenis ini kan memiliki warna yang menarik,” kata Saptono.

Nama Mino Ngremboko yang tenar membuat Dusun Bokesan rajin dikunjungi oleh banyak pihak. Mulai dari sekedar berwisata hingga penelitian. Ke depan, seperti rencana Pemerintah Kabupaten Sleman, KPI Mino Ngremboko akan menjadikan Kampung Nila sebagai daya tarik wisata. Hal ini juga didukung dengan keberadaan kolam renang yang dimiliki salah satu anggotanya. “Ini bisa untuk wisata edukasi dan ekologi,” kata Saptono.

BAB V

PENUMBUHAN KELOMPOK DAN DIGITALISASI SARANA

Desa Miritpetikusan Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah kini tak pernah sepi. Hilir mudik kendaraan warga selalu meramaikan jalan-jalan pedesaan yang asri tersebut dari pagi hingga sore hari. Warung-warung penjaja makanan yang dulu sepi kini tumbuh subur. Keramaian ini mulai terjadi sejak desa tersebut diresmikan menjadi Desa Wisata Kampung Garam sejak September 2019 oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tak seperti desa-desa penghasil garam lainnya, Kampung Garam di Desa Mirit cukup menarik. Jika pada lahan tambak garam umumnya kolam kristalisasi dibuat terbuka, di Kampung Garam ini dibuat dalam tunnel yang menarik untuk difoto. Tak heran jika sebagian besar wisatawan datang berkunjung dan berfoto di tunnel tersebut. Foto-foto wisatawan tersebut lalu beredar di media social sehingga menarik rasa penasaran masyarakat lain.

Pembuatan meja kristalisasi dalam bentuk tunel ini memiliki alasan khusus. Yaitu tidak terpengaruh karena cuaca hujan sehingga garam yang dihasilkan bersih. Sebelumnya kawasan yang sekarang dijadikan sebagai Desa Wisata Kampung Garam yang terletak di pesisir Pantai Selatan Jawa ini sepi-sepi saja. Warga sesekali mendatangi lokasi hanya untuk menikmati pemandangan di pantai. Belum ada atraksi wisata lainnya yang membuat warga mau berlama-

“ *Garam yang dihasilkan oleh Kampung Garam Kebumen telah memiliki izin edar dari Badan POM Republik Indonesia dan Standar Nasional Indonesia (SNI).* ”

lama di lokasi tersebut. Kini selain terdapat *tunnel* garam yang menjadi spot foto, juga terdapat beberapa atraksi wisata lainnya, yaitu Kolam Air Garam dan Kolam Ikan Nilam Tulmen yang banyak dimanfaatkan untuk terapi kaki. Tak hanya sebagai objek wisata, Kampung Garam juga menjadi pusat edukasi. Warga bisa belajar semua hal tentang garam di gudang-gudang milik warga dan dibimbing oleh para pemandu yang memang ahli tentang garam.

Kawasan peisisir selatan Kebumen memang telah berubah menjadi kawasan garam. Membentang dari Kecamatan Ambal, Mirit, Puring, hingga Klirong. Sejak Pemerintah Kabupaten Kebumen membangun Kampung Garam, banyak warga yang kemudian tertarik untuk petambak garam. Mereka lalu membentuk kelompok-kelompok petambak garam. Pada tahun 2018 jumlah kelompok usaha garam rakyat hanya ada tiga kelompok, kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 10, dan di tahun 2020 hingga bulan Juni mencapai 20 kelompok. Salah satunya adalah kelompok petani garam rakyat Sari Laut Kidul, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong.

Menurut Rasikun, Ketua kelompok petani garam rakyat Sari Laut Kidul, geliat usaha garam rakyat di Desa Tanggulangin mulai ada sejak awal mula Kampung Garam Desa Mirit dirintis. Warga Desa Tanggulangin terdorong menciptakan usaha garam setelah mengetahui banyaknya lahan kosong di wilayah mereka. Tambak

garam di kawasan tersebut dibangun di atas lahan seluas kurang lebih setengah hektar. Terdapat sekitar 18 *tunnel* di kawasan ini. Dalam satu kali panen, garam yang dihasilkan mampu mencapai 7-8 kwintal.

Bupati Kebumen Yazid Mahfudz, dalam kegiatan Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020 di Keementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Agustus 2020 menjelaskan jika kehadiran Kampung Garam Kebumen telah berdampak pada produksi dan pengolahan garam yang terus meningkat kuantitas dan kualitasnya. Produksi garam di wilayahnya disebut telah mencapai 120,36 ton dengan kadar NaCl 97,73 persen. Garam yang dihasilkan oleh Kampung Garam Kebumen telah memiliki izin edar dari Badan POM Republik Indonesia dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tak hanya itu, terdapat juga dampak *multiflier effect* berupa terbukanya lapangan kerja baru bagi petambak garam (termasuk rumah tangga miskin dan perempuan) dengan pembinaan kelembagaan kelompok usaha garam rakyat dan koperasi serta pengembangan edu-wisata.

Dalam prosesnya pembentukan Kampung Garam Kebumen ini dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap perencanaan dengan membentuk tim inovasi, penyusunan *masterplan* usaha garam, dan penyusunan riset unggulan daerah kelayakan usaha garam. Tahap kedua adalah pelaksanaan, di antaranya melakukan koordinasi dengan *stakeholder* internal dan eksternal, pelatihan dan pemberian akses teknologi, pengembangan kelembagaan kelompok dan koperasi, pembuatan demplot produksi dan pengolahan garam, pengadaan sarpras produksi dan pengolahan dengan pembiayaan swadaya masyarakat, pemerintah, dan CSR BUMN serta swasta. Dan tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim inovasi internal secara periodik setiap bulannya. Tim Monev berasal dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Kebumen dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berbagai kerja sama telah dilakukan telah dilakukan Pemkab Kebumen dengan instansi swasta. Salah satunya dengan PT Kimia Farma untuk pemasaran garam farmasi/industri, produksi dan pengolahan garam dengan tidak merusak lingkungan dan tanpa menghasilkan limbah (*zero waste*).



5.1 Penyuluh Menumbuhkan kelompok Masyarakat Sektor Kelautan Perikanan

Sebenarnya usaha garam rakyat di Kebumen dimulai secara resmi sejak 2018 setelah beberapa kelompok petambak garam mengikuti acara penyuluhan pemanfaatan tunnel pengolah garam rakyat yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di Pantai Buntan, Adipala, Cilacap.

Dalam kegiatan tersebut, setiap kelompok tani garam diajarkan teknologi lahan garam sistem tertutup dengan model yang dikembangkan, yaitu model prisma, tunnel, dan *on off*. Ternyata setelah diterapkan di kawasan tambak garam di kawasan pesisir pantai selatan Jawa, teknologi ini berhasil karena kualitas air laut di Pantai Selatan masih relatif baik dan bersih untuk bahan baku membuat garam krosok. Kegiatan penyuluhan tersebut pada akhirnya menumbuhkan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) di Kabupaten Kebumen.

Pembentukan kelembagaan kelompok pelaku utama sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tugas penyuluh perikanan dalam melaksanakan pendampingan. Tujuannya, selain sebagai indikator kinerja bagi penyuluh perikanan dalam melaksanakan pendampingan kelompok perikanan, juga sebagai acuan dalam rangka pembinaan kelembagaan pelaku utama perikanan. Kelembagaan kelompok pelaku utama perikanan ini antara lain dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibentuk oleh nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang dibentuk oleh pembudi daya ikan, Kelompok Pengolah dan Pemasaran (POKLAHSAR) yang dibentuk oleh pengolah dan pemasar ikan, Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang dibentuk oleh petambak garam, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam penumbuhan kelompok tersebut, penyuluh tidak boleh asal menentukan wilayah dan kelompok warga. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, penumbuhan kelembagaan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan merupakan proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai dan keserasian hubungan antara pelaku utama. Kesadaran ini selanjutnya menjadi faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, di mana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari apa yang ada dalam kelompok.

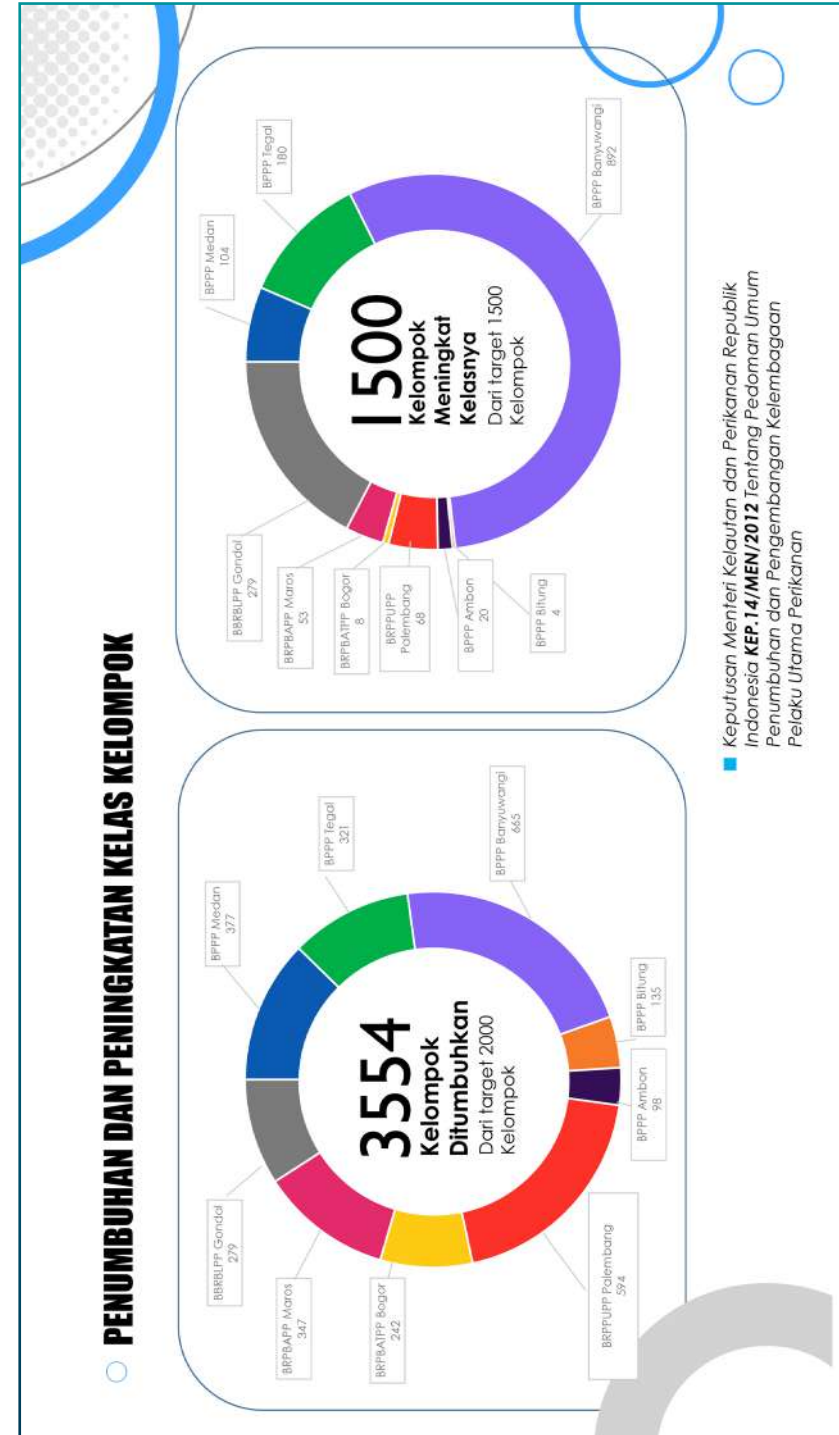
Penumbuhan kelompok ini tidaklah sulit jika mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan. Yaitu kelompok yang ditargetkan harus mempunyai tujuan, minat, dan kepentingan yang sama terutama mdalam bidang usaha sektor kelautan dan perikanan (KP); memiliki usaha sektor KP; memiliki kesamaan dalam tradisi kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, atau bahasa; mandiri dan partisipatif; serta merupakan binaan penyuluh perikanan. Seorang penyuluh perikanan yang diberikan tugas untuk menumbuhkan kelompok

pelaku utama ini harus bisa memotivasi masyarakat binaannya agar bisa tumbuh mandiri dan berkembang. Salah satu caranya adalah dengan terus memberikan pembinaan dan pendampingan teknis melalui diskusi, edukasi, dan tentunya interaksi langsung dengan masyarakat.

Kelompok-kelompok yang terbentuk kemudian akan terbagi menjadi beberapa kelas. Yaitu kelas Pemula, Kelas Madya, dan Kelas Utama. Berdasarkan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2012, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan merujuk kepada lima tolak ukur yaitu, perencanaan, kemampuan berorganisasi, akses kelembagaan, kemampuan wirausaha, dan kemandirian. Sebuah kelompok pelaku utama bisa naik kelas jika mampu memenuhi indikator yang ditetapkan. Yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Artinya peningkatan kelas kelompok harus sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan/ pembudidaya /pengolah / pemasar /petambak.

Sampai dengan Desember 2020, Puslatluh telah menumbuhkan 3554 kelompok, melebihi angka yang ditargetkan, yaitu 2000 kelompok. Sementara jumlah kelompok yang mengalami peningkatan kelas mencapai 1597 kelompok dari target sejumlah 1500 kelompok.

“ *Kelompok-kelompok yang terbentuk kemudian akan terbagi menjadi beberapa kelas. Yaitu kelas Pemula, Kelas Madya, dan Kelas Utama.* ”



Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia **KEP.14/MEN/2012** Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

5.2 Pendampingan Akses Permodalan

Selain menumbuhkan kelompok dan meningkatkan kelas, tugas penyuluh perikanan memberikan pendampingan akses modal dan pasar, serta membina usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan (KP). Ini sejalan dengan komitmen KKP untuk meningkatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha perikanan di mana tujuan akhirnya adalah untuk membangkitkan sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta industri kelautan dan perikanan. Dengan begitu, produksi perikanan meningkat dan masyarakat sejahtera.

Pendampingan akses permodalan oleh penyuluh perikanan kepada kelompok pelaku utama ini sangat penting. Pasalnya, saat ini masih ada pelaku usaha perikanan yang belum cukup memiliki literasi keuangan dalam membangun usaha. Penyebabnya utamanya dikarenakan minimnya informasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan informasi calon debitur potensial di sisi lembaga pembiayaan. Karena itu kami memastikan semua elemen penyuluh perikanan (Penyuluh Perikanan PNS, PPB, dan PPS) harus siap menjadi media penghubung antara pelaku usaha dengan pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Bentuk sinergi penyuluh perikanan dengan tenaga pendamping LPMUKP di lapangan berupa sosialisasi akses permodalan LPMUKP kepada kelompok binaan penyuluh perikanan, penyusunan proposal usaha kelompok untuk mendapatkan akses permodalan usaha, mendampingi tenaga pendamping LPMUKP ke lahan usaha kelompok, mendampingi kelompok pada akad pencairan dana pinjaman, serta monitoring pemanfaatan akses permodalan usaha pasca pencairan dana pinjaman. Adapun petunjuk bagi penyuluh perikanan melakukan penyuluhan dan pendampingan pelaku usaha telah diatur dalam Peraturan Kepala BRSDMKP No.2/PER-BRSDM/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perikanan.

Tahun ini KKP menargetkan peningkatan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program sebesar Rp3 Triliun dan meningkat secara bertahap menjadi Rp4,2 Triliun pada tahun 2024. Kredit program ini yaitu berupa Kredit Usaha Rakyat, Dana Bergulir LPMUKP, dan Kredit Ultra Mikro.

KERJA SAMA PERMODALAN TAMBAK DENGAN BLU-LPMU KP

Pendampingan penyuluh di lapangan berhasil membantu individu/kelompok pelaku usaha KP memperoleh dukungan pendanaan usaha dari BLU-LPMUKP

Cirebon: Budidaya udang vaname

Desa Pangenan, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Jawa Barat
Luasan Tambak A: 1.000 m² Tambak B: 30.000 m²
Nilai permohonan pinjaman Rp250,1 juta

Indramayu: Budidaya udang vaname

Blok Ulaban, Desa Singaraja, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat
Luasan tambak 1.200 m²
Nilai permohonan pinjaman Rp191,01 juta

BPPP Banyuwangi: Budidaya udang vaname

Desa Bangsring, Kec. Wosongrejo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
Luasan Tambak A: 2.500 m² Tambak B: 800 m²
Nilai permohonan pinjaman Rp259,371 juta

BPPP Bitung: Budidaya udang skala mini empang plastik (busmetik)

Bitung, Sulawesi Utara
Luasan Tambak A: 150 m² Tambak B: 150 m²
Tambak C: 300 m² Tambak D: 300 m²
Nilai permohonan pinjaman Rp311,543 juta



“*Fasilitas penyuluhan di pusat, provinsi, maupun daerah perlu dilengkapi dengan sebuah call center. Call center ini dapat dijadikan sebagai saluran komunikasi penyuluh dengan para ahli yang telah disiapkan.*”

5.3 Dukungan Sarana dan Prasarana Teknologi Digital

Lancarnya penyelenggaraan kegiatan penyuluhan juga tak lepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu KKP, melalui BRSDM tengah gencar membenahi sarana prasarana penyuluhan. Tak hanya menyiapkan kendaraan darat dan air, alat kerja, perangkat pengolah data, dan perangkat komunikasi, ke depan KKP juga akan melengkapi penyuluh dengan fasilitas-fasilitas lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang ada. Para penyuluh akan kita lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin akan berbeda dari fasilitas yang sudah ada sebelumnya. Dengan masuknya teknologi digital kami akan mendorong para penyuluh untuk membentuk formasi organisasi kerja di masyarakat. Fasilitas penyuluhan di pusat, provinsi, maupun daerah perlu dilengkapi dengan sebuah *call center*. *Call center* ini dapat dijadikan sebagai saluran komunikasi penyuluh dengan para ahli yang telah disiapkan. Para ahli untuk mengisi *call center* ini bisa berada di mana saja di seluruh Indonesia. Kita bisa menyediakan ahli formulasi pakan, ahli penyakit, ahli produksi, ahli tata guna lahan, dan sebagainya. Sehingga ke depannya ketika penyuluh menemui kendala atau masalah di lapangan bisa langsung menghubungi *call center* dan dihubungkan untuk berkonsultasi dengan ahli yang sesuai.

Sehingga dengan adanya komunikasi langsung sesuai kebutuhan masyarakat ini, konsep dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tetap bisa kita laksanakan di dalam program penyuluhan ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kepala BRSDM Sjarief Widjaja telah meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten

untuk melakukan arsip informasi digital dengan tertib. Arsip ini dapat dikembangkan dalam sistem informasi digital yang dapat digunakan penyuluh sebagai sumber informasi untuk kelengkapan usaha para pelaku utama/usaha. Seperti informasi suplai, lokasinya, harga pakan, obat, vaksin, termasuk juga berbagai peralatan kincir, dan sebagainya. Semua data akan diunggah ke sistem informasi kita. Termasuk tentang tahap produksi, tata cara untuk budidaya, tata cara untuk mengobati ikan, tata cara untuk mendeteksi ikan ini sehat atau menghadapi penyakit, dan seterusnya.

Selain itu, sistem informasi digital ini juga harus menyediakan informasi pasar yang dapat menyerap hasil produksi pelaku utama/usaha lengkap dengan penawaran harga. Termasuk juga menyediakan informasi bagi pelaku usaha untuk bermitra dengan *e-commerce* seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Untuk mendukung kegiatan penyuluhan, sejak 2007 hingga 2013, KKP telah mengadakan 4.946 unit sarana penyuluhan senilai Rp26,345 miliar yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

KKP Sediakan Sarana dan Prasarana Dukung Penyuluh Perikanan

(Infopublik.id. Sabtu, 15 Agustus 2020)



Guna mendorong kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah terus berupaya menyediakan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasana ini dipercaya dapat meningkatkan kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh dalam mendampingi masyarakat di lapangan.

Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan serah terima naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima barang milik daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2020) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja menyebut, serah terima ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada lampiran huruf (Y) diatur bahwa kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sebagai implikasinya, dilakukan pengalihan Personel, Pembiayaan, Prasarana dan Sarana, serta Dokumen (P3D). KKP telah menyelesaikan proses pengalihan Personil, Pembiayaan, dan Dokumen. Sementara Prasarana dan Sarana Penyuluhan ditargetkan selesai di tahun 2020 ini. Sarana prasarana penyuluhan ini tersebar di 427 kabupaten/kota.

“Kami sampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Dua kabupaten ini merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang sudah menyelesaikan persoalan asetnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tutur Sjarief di Loka Riset Mekanisasi Perikanan Bantul.

Sjarief menegaskan, pengalihan status penyuluh perikanan dari kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat merupakan bentuk koordinasi dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah. Keduanya bekerja sama memaksimalkan peran penyuluh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebagaimana diketahui, penyuluh berperan mendampingi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, hingga petambak garam. Dalam menjalankan perannya tersebut, penyuluh diharapkan dapat mencerahkan (enlightenment) dan memperkaya (enrichment) masyarakat dengan informasi Iptek, akses permodalan, akses pemasaran, dan akses sumber daya lainnya. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memberdayakan (empowerment) pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

“Presiden sudah mengarahkan agar KKP memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan penguatan budidaya perikanan. Di sini penyuluh perikanan memegang peranan penting,” beber Sjarief.

Selain itu, pemerintah juga tengah menggalakkan pembangunan sektor perikanan budidaya untuk penyediaan lapangan kerja dan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat. Provinsi DIY, khususnya Kabupaten Sleman dan Kulon Progo termasuk daerah pengembangan perikanan budidaya ini.

Dalam upaya pengembangan sektor perikanan budidaya ini, KKP akan membangun percontohan (demplot) budidaya terintegrasi di tengah masyarakat. Pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Untuk itu, Sjarief berharap dilakukan peningkatan kinerja penyuluh atau bila diperlukan penambahan jumlah penyuluh di masing-masing daerah.

Sjarief mengungkapkan, per 13 Agustus 2020, penyuluh perikanan di Provinsi DIY adalah sejumlah 50 orang yang terdiri dari 26 penyuluh perikanan PNS dan 24 orang penyuluh perikanan bantu (PPB). Di Kabupaten Sleman, terdapat 5 penyuluh perikanan PNS dan 5 PPB. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo terdapat 9 penyuluh perikanan PNS dan 4 orang PPB.

Guna mengoptimalkan pendampingan terhadap masyarakat, KKP berencana akan memberdayakan kembali 421 orang penyuluh perikanan swadaya. Mereka ini berasal dari kelompok pelaku utama kelas Madya dan Utama dan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).

“Di masa pandemi ini, penyuluh perikanan harus tetap melakukan tugasnya mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya sarana prasarana penyuluhan menjadi penting karena wilayah kerjanya cukup luas sedangkan jumlah tenaga terbatas,” ucap Sjarief.

Sementara, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilia Pregiwati mengatakan, pada periode 2007 hingga 2013, KKP melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan telah mengadakan sarana penyuluhan perikanan. Sarana tersebut di antaranya kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, perahu motor, speed boat, water test kits (DO meter, PH meter, dan salinitas), perangkat pengolah data (computer, printer, dan UPS), serta telepon selular dan netbook.

Adapun pada kesempatan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menyerahkan hibah barang milik daerah berupa 13 unit sepeda motor. Sementara Kabupaten Kulon Progo menyerahkan hibah berupa 7 unit sepeda motor.

“Dengan kegiatan serah terima hari ini, kami berharap kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia dapat termotivasi untuk juga segera melakukan serah terima sarana prasarana penyuluhan kepada KKP,” tandas Lilly.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di DIY, khususnya Kabupaten Sleman. Menurutnya, di tengah wabah Covid-19, sektor perikanan sangat membantu perekonomian masyarakat.

“Di masa pandemi ini, dengan pendampingan dari penyuluh perikanan, usaha skala kecil hingga menengah di sektor perikanan ini tetap bisa berjalan. Hasil produksi masyarakat dapat diserap. Sektor perikanan menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat saat ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibantu dengan hadirnya penyuluh perikanan dapat benar-benar memakmurkan kehidupan masyarakat. Adapun Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Sudarno menyampaikan apresiasi atas sinergi yang tercipta. Ia mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah pusat dengan melakukan pelaporan aset secara tertib.

Namun, ia juga meminta penambahan tenaga penyuluh perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan ideal di wilayahnya. “Kita harus bangga, di tengah pandemi ini, sektor perikanan berkontribusi cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Kita ikut membantu mengupayakan agar tidak terjadi pertumbuhan negatif ekonomi nasional dan Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi,” pungkasnya.

BAB VI

LOYALITAS DAN BAKTI UNTUK NEGERI

Menjadi penyuluh perikanan bukanlah cita-cita Eightina Rosintan. Terlebih, orang tuanya, terutama sang ayah, lebih menginginkan ia menjadi tenaga pengajar. Namun seiring waktu ia semakin menyukai pekerjaannya tersebut dan menjadi *passion* dalam hidupnya.

Eightina dilahirkan di kota Dumai, Provinsi Riau pada tanggal 18 Agustus 1965. Di kota ini pula ia menghabiskan masa kecilnya dari balita, TK, SD, SMP sampai SMA di kota Dumai. Ibu dari dua anak ini kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Riau, Fakultas Perikanan Jurusan Budidaya Perikanan dari tahun 1984-1989. Semasa kuliah ini ia pernah menjadi Asisten Dosen Praktikum Ichthyology selama 2 tahun.

Suatu hari Ir. Agustinus Mansur Sinaga, salah satu kerabatnya yang menetap di Lampung berkunjung ke rumah. Sang kerabat saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Benih Ikan Provinsi Lampung yang ada di Pekalongan Kota Metro, Provinsi Lampung. Eightina yang baru saja lulus dan menjalani wisuda di bulan Oktober 1989 ditawarkan bekerja untuk menjadi Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) di Lampung. “Saya sempat menolak tawaran tersebut karena harus meninggalkan Dumai dan merantau ke Lampung,” cerita Eightina.

Namun karena desakan orangtua, ia pun akhirnya menurut. Apalagi kerabatnya bercerita jika menjadi PPS akan sering mengikuti pendidikan dan latihan serta memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2. Pada bulan desember 1989 ia pun mengikuti tes sebagai PPS. “Puji syukur kepada Tuhan karena saya dinyatakan lulus seleksi,” tuturnya. Awal Januari 1990 ia pun pindah ke Kabupaten Lampung Selatan. Di kota ini Eightina mengawali kiprahnya sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) bidang perikanan sebagai tenaga honorer pada Kantor BIMAS, Departemen Pertanian di Lampung. “Bukan pekerjaan mudah,” ceritanya. Namun ia beruntung memiliki teman-teman satu profesi yang selalu membantu, mendorong dan memotivasinya.

Suatu kesempatan emas yang tidak terlupakan seumur hidupnya yaitu ketika pada bulan Juni 1990 ia mengikuti Tes Pertukaran Pemuda Indonesia-Jepang, mewakili Kabupaten Lampung Selatan. Ini merupakan program kerjasama Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pemuda dan Olah Raga dengan Pemerintah Jepang melalui JICA (Japan Internatioal Council Agency). Eightina dinyatakan lulus tes dan menjadi wakil dari Provinsi Lampung untuk mengikuti program tersebut.



Selama satu bulan menjadi tamu kehormatan di negri Sakura, Eightina banyak berinteraksi dengan masyarakat negara tersebut. Ia juga melakukan tur ke kota-kota pariwisata dan bersejarah di Jepang seperti Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Provinsi Shiga, melihat dengan dekat aktivitas petani padi, kedele, sapi, teh, dan bunga. Melihat tempat pelelangan ikan, pusat perbenihan dan pusat keramik. Bahkan bertemu dengan penyuluh pertanian. “Jelas pengalaman ini adalah pengalaman terindah yang tidak akan pernah dilupakan,” katanya.

Periode pengangkatan jabatan

Dua tahun berstatus sebagai honorer, pada tahun 1992 Eightina akhirnya diangkat sebagai Calon PNS dengan posisi sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis bidang Perikanan di Kabupaten Lampung Selatan. Saat itu sempat terjadi pergantian kebijakan pemerintah di mana Kantor Wilayah Pertanian dihapuskan sehingga para penyuluh diserahkan ke Dinas Sub Sektor. “Tahun 1992-1996 adalah masa tidur bagi penyuluh, termasuk penyuluh perikanan,” katanya. Maklum, dalam periode tersebut kegiatan penyuluh perikanan lebih ke kegiatan struktural, seperti membuat laporan statistik, pengumpul retribusi PAD, dan membantu pelaksanaan program dinas.

Meskipun demikian, beberapa kegiatan penyuluh perikanan tetap dilakukan seperti melatih pada kursus petani ikan, nelayan, kelompok pengolahan ikan, dan tambak. Bahkan, Eightina ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek di masa kepemimpinan Kepala Dinas Perikanan Ir. Cjipto Hendro Gamino dan Ir. M. Agus Sutriyo. Tahun 1996, penyuluh mulai bangkit, di mana berdiri Balai Informasi Penyuluh Pertanian (BIPP). BIPP menjadi Satminkal penyuluh di mana pada tahun 2000 berubah menjadi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian (KIPP) dan pada tahun 2008 menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

Baik di BIPP, KIPP dan sampai sekarang di BP4K, Eightina tetap menjadi penyuluh. Ia sangat aktif sebagai pembina BPP, Tim Penilai Kredit Poin, melatih di BPP, Tim Penilai Penyuluh-Petani-BPP, membimbing penyuluh, kelompok tani, dan membantu kegiatan BP4K.

Bulan Mei 2010, ia beralih status (*inpassing*) dari Penyuluh Pertanian menjadi Penyuluh Perikanan dan ditunjuk sebagai

“Berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh perikanan, di antaranya pertemuan rutin bulanan, workshop penyuluh perikanan, seminar, temu teknis, latihan penulisan, dan studi banding.

koordinators Penyuluh Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. Tugasnya yaitu membimbing 12 penyuluh perikanan, 2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan 1 orang penyuluh pusat.

Cakupan wilayah kerjanya terdiri dari 256 desa di 17 kecamatan,. Di dalamnya terdapat 11.000 ha potensi air tawar (lele, patin, nila, mas, dan gurami, 5.000 ha potensi tambak intensif, 30.000 ha potensi rumput laut *Eucheuma* spp, dan 5.000 ha potensi perikanan kerapu.

Adapun kelembagaan pelaku utama perikanan yang sudah terbentuk dan teregistrasi di BP4K setempat adalah sebanyak 314 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), 66 Kelompok Pengolahan dan Pemasar (Poklhasar), 155 Kelompok USaha Bersama (KUB), dan 3 Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas).

“Setiap bulan kami upayakan ada pertemuan penyuluh perikanan dengan masyarakat,” kata Eightina. Berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh perikanan, di antaranya pertemuan rutin bulanan, *workshop* penyuluh perikanan, seminar, temu teknis, latihan penulisan, dan studi banding.

Tahun 2014 Eightina mendapat tambahan tugas membina kecamatan, yaitu kecamatan Way Panji. Terdiri dari 4 desa, dengan potensi perikanan 36 ha, baru dimanfaatkan 12 ha, dengan Rumah

Tangga Perikanan (RTP) 92 orang, 6 Pokdakan yang sudah teregister dan 16 kelompok yang baru dibentuk. Komoditas yang dibudidayakan adalah ikan lele, nila, patin, dan gurame.

Suka duka menjadi penyuluh perikanan

Selama menjalani profesi sebagai penyuluh perikanan, Eightina mengaku banyak memperoleh pengalaman pahit dan manis. Pengalaman pahit yang ia rasakan di antaranya adalah harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk bisa menuju ke lokasi binaan. Ia harus rela naik turun kendaraan umum karena belum memiliki kendaraan pribadi. Tak jarang selama di perjalanan ia harus bertemu pencopet, berdiri di dalam bis sepanjang perjalanan karena tak mendapatkan tempat duduk, atau bergabung dengan ibu-ibu yang baru pulang dari belanja di pasar.

Pernah suatu ketika, Eightina yang sudah mendapatkan kendaraan operasional berupa kendaraan roda dua mengalami kecelakaan terjatuh dari motor saat melintasi jalanan yang rusak. “Bersama teman-teman penyuluh lainnya saya juga pernah tercebur ke laut karena perahu yang kami tumpangangi terbalik diterjang ombak,” ceritanya.

Tiba di lokasi binaan, tak jarang ia harus berhadapan dengan para pelaku usaha perikanan yang memiliki beragam karakter. “Mereka menganggap usaha perikanan hanya sebagai usaha sampingan dari usaha pertanian,” katanya. Sehingga semangat para pelaku usaha ini untuk mengembangkan usaha perikanan sangat rendah. “Apalagi ketika itu penyuluhan pertanian banyak memberikan bantuan dana sementara di sektor perikanan sendiri sangat jarang,” ceritanya.

Imbasnya, banyak pelaku usaha yang menjalankan program dari Dinas Perikanan hanya setengah hati. “Yang membuat kami, para penyuluh terpaksa menjadi ujung tombak untuk menyakinkan para pelaku,” jelasnya. Tantangan lainnya, menurut Eightina, adalah kebiasaan pelaku utama yang lebih senang meminjam duit dengan rentenir (bos) daripada ke bank, meski bunga yang dipersyaratkan lebih tinggi. “Tugas kami adalah menyakinkan mereka untuk keluar dari jeratan para rentenir tersebut,” ungkapnya.

Di balik cerita-cerita penuh duka dan tantangan tersebut, Eightina juga mengalami masa-masa bahagianya sebagai penyuluh



perikanan. Dimulai dari melihat keberhasilan para masyarakat binaan melakukan panen perdana dengan hasil yang memuaskan, menjual ikan hasil panen dengan harga kompromi kepada pembeli yang didapatkan penyuluh, hingga terharu bangga melihat senyum masyarakat binaan yang melihat produk olahan mereka terpajang di salah satu konter terminal eksekutif Pelabuhan Bakauheni.

“Pelaku usaha juga semakin mandiri dalam mengelola usahanya, mereka sudah bisa menjual produknya ke luar Lampung secara mandiri, hingga menemukan cara sendiri mengatasi kematian benih ikan lele, membuat obat ikan herbal mandiri,” jelasnya. “Saya selalu menekankan kepada pembudidaya untuk berinovasi dan menjadi professor di lahan usahanya. Gagal jangan patah arang. Cari akar kegagalan sampai tuntas,” tambah Eightina.

Eightina mengaku semakin terharu bahagia manakala masyarakat binaannya mendapatkan bantuan dari dinas. “Mereka sampai mengucapkan terima kasih kepada kami, para penyuluh,” katanya.

Ia bahkan semakin termotivasi menjalankan tugas sebagai penyuluh perikanan, karena selain bisa menerapkan ilmu semasa kuliah pada masyarakat, ia pun banyak belajar dari pelaku utama dalam

hal usaha bidang perikanan, mulai dari budidaya dan pengolahan. “Semakin bangga ketika mampu mengantarkan kelompok binaan menjadi juara tingkat provinsi dan nasional, serta meraih predikat sebagai penyuluh perikanan teladan nasional mewakili Lampung bersama Lia Yulianti, Sutisna, dan Amin Bunyamin,” ceritanya.

“Penyuluh perikanan adalah pekerjaan yang mulia, pahlawan tanpa tanda jasa seperti guru. Penyuluh adalah motivator, fasilitator, sekaligus inovator. Penyuluh harus serba bisa. Hebat di lapangan maupun dalam mengurus pekerjaan administrasi. Penyuluh harus hebat bernegosiasi, supel, bisa bergaul dengan masyarakat, aparat pemerintah bahkan Anggota dewan. Pemberani tak ada rasa takut, sehingga sedikit agak vocal,” pungkas Eightina.

Antara hobi dan tugas

Di sela kegiatannya sebagai penyuluh, Eightina juga aktif mengajar mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan dan Dasar-Dasar Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Surya Dharma Wacana, Bandar Lampung,

Ia juga masih menggeluti hobi menyelam dan terdaftar sebagai anggota Krakatau Diving Club (KDC). Berbagai macam titik selam dan *snorkeling* tersebar di sepanjang pantai pesisir Lampung Selatan mulai dari Kecamatan Kalianda, Penengahan, Bakauheni, dan Ketapang telah ia jelajahi.

PEMBUKTIAN PENUNTAS DENDAM

Mengawali karir sebagai penyuluh dengan banyak tantangan tak membuat Maria Niken Tri Ubaya Sakti surut untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ia membuktikannya dengan prestasi.

Niken, begitu ia biasa disapa memulai karirnya sebagai penyuluh di tahun 2010. Setelah lulus seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ia ditempatkan sebagai tenaga penyuluh perikanan PNS posisi jenjang ahli muda di Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kondisi tenaga penyuluh di kantor dinas tersebut, saat pertama kali ia tiba, menurutnya sungguh jauh di luar ekspektasinya. “Sebagian besar laki-laki dan hanya terdapat satu orang perempuan saat itu,” ceritanya. Niken yang masih minim pengalaman saat itu mendapatkan tugas yang cukup berat.

“Saya bersama Ibu Yunia Laraswati, tenaga penyuluh perempuan lainnya di kantor mendapatkan lokasi binaan yang menurut kami cukup jauh dan berat bagi seorang perempuan,” kenang Niken. Lokasi binaanya berada di Desa Tanjakan, Kecamatan Kubutambahan. Jaraknya sekitar 70 kilometer dari tempat tinggalnya dengan akses jalan yang harus ditempuh berupa pegunungan dan sangat terjal untuk kendaraan roda dua. Niken yang cuma bisa pasrah akhirnya menerima penugasan tersebut dan menjalaninya.

“Namun di dalam hati saya bertekad untuk bisa membuktikan kepada pimpinannya dan tenaga penyuluh lain di kantor bahwa saya akan tetap bertanggung jawab pada pekerjaan saya dan meraih prestasi yang bisa dibanggakan,” katanya. Maklum ketika itu, menurutnya, sebagian besar tenaga penyuluh yang ada menganggap ‘biasa saja’ pekerjaan mereka. “Mereka tak memiliki arah maupun target tertentu karena memang kondisinya seperti itu.”

Menurut Niken, ketika itu koordinasi penyuluhan memang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. “Banyak kegiatan penyuluhan yang tidak memiliki *outcome* atau hasil akhir yang terarah, tidak ada indikator keberhasilan,” katanya. Sehingga, kata Niken, semangat mereka untuk memberikan penyuluhan pun terkesan biasa saja. Menurutnya, kegiatan penyuluhan ketika itu lebih tergantung pada masing-masing peran penyuluhnya sendiri. “Jika memang mereka memiliki target untuk memajukan masyarakat binaannya akan terlihat dari progresnya. Namun jika penyuluh tersebut tak memiliki program yang jelas, hasilnya kelompok yang dibina pun tak berkembang.”

Bahkan, menurutnya, sempat terdengar jika kedatangan ia ke dinas sebagai tenaga penyuluh diprediksi akan seperti penyuluh-penyuluh sebelumnya. “Hal ini bukan menyurutkan langkah saya malah semakin melecut saya untuk berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai penyuluh,” katanya. Ia menganggap itu sebagai dendam positif yang ingin dibuktikannya.



“*Jika memang mereka memiliki target untuk memajukan masyarakat binaannya akan terlihat dari progresnya. Namun jika penyuluh tersebut tak memiliki program yang jelas, hasilnya kelompok yang dibina pun tak berkembang.*”

Hari demi hari Niken lalui sebagai tenaga penyuluh perikanan dengan menempuh jarak sejauh 70 km hanya demi menemui dua kelompok binaan. “Setelah sekian lama saya mulai berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini tidak efisien dan efektif,” katanya. Apalagi, menurutnya, ketika itu ia harus bergerak sendiri tanpa pendampingan dari para penyuluh pendamping atau senior. “Akhirnya saya mencari informasi dan menemukan bahwa di lokasi binaan tersebut terdapat posko atau pusat berkumpulnya para penyuluh pertanian. Saya pun meminta izin untuk bergabung dengan mereka di posko tersebut.”

Selain buta masalah lokasi binaan, hambatan lain yang dialami adalah dalam hal berkomunikasi. “Saya orang Jawa sehingga tidak banyak mengerti tentang bahasa Bali. Sementara karakteristik masyarakat pedesaan di Bali adalah sulit untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Jadi saya kesulitan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang saya miliki,” tuturnya.

Bergabung bersama Tim Penyuluhan Pertanian ternyata banyak memberikan manfaat bagi Niken. “Saya banyak mengikuti kegiatan penyuluhan mereka sehingga bisa beradaptasi lebih cepat, baik mengenai lokasi maupun bahasa,” katanya. Menurut Niken, setiap kali mengikuti tim penyuluhan pertanian, ia juga selalu diberi kesempatan untuk mengadakan penyuluhan. Sinergi tersebut rupanya membuahkan hasil karena Niken berhasil menambah jumlah kelompok binaannya.

Berkat bantuan tim penyuluh pertanian, Niken mengenal salah seorang Perbekel atau kepala desa di Bali. Rupanya sang perbekel ini banyak mendengar kiprah Niken dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa yang ada di Buleleng. Lewat seorang teman, sang perbekel ini pun minta dipertemukan dengan Niken. kepadanya, Perbekel ini lalu bercerita bahwa di desanya yang berada pada ketinggian 700 di atas permukaan laut (dpl), waga desa kesulitan memperoleh ikan segar. Perbekel ini mengeluhkan jika selama ini warga hanya bisa menikmati ikan-ikan yang sudah diawetkan dan dibekukan. “Akhirnya saya melakukan pendampingan masyarakat untuk ujicoba budidaya ikan lele karena melihat keterbatasan air yang ada,” katanya.

Niken pun harus rela menempuh jarak sekitar 33 km setiap harinya selama pendampingan tersebut. Pembudidaya awalnya diminta untuk menebar 750 benih lele dalam satu kolam. Namun rupanya sang Perbekel sudah terlanjut bersemangat hingga diputuskan untuk membuka lima kolam budidaya baru. “Tantangan saya saat itu adalah bagaimana membudidayakan lele di kondisi kawasan budidaya yang cukup tinggi,” katanya. Beruntung Niken mau belajar sehingga ia tak kesulitan mengatasi teknik budidaya tersebut. Pembudidaya pun berhasil menikmati hasil panen mereka yang melimpah. “Saya kemudian mendapatkan tantangan baru dari perbekel.”



“*Dalam jangka waktu dua tahun akhirnya saya bisa mengembangkan delapan kelompok binaan.*”

Menurut Niken, melihat panen perdana yang berhasil, Perbekel memiliki ide untuk tidak hanya menjual hasil budidaya dalam bentuk mentah namun juga ingin mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dari hasil panen tersebut sehingga memiliki nilai tambah. “Saat itu saya langsung menyatakan diri siap untuk membantu proses tersebut tanpa memikirkan lebih jauh tantangan yang saya hadapi ke depannya,” kata Niken. Ternyata, kelompok binaannya ini kerap mengadakan pertemuan di sore hari. “Mau tidak mau saya harus mengikuti jadwal mereka karena sebagai penyuluh saya harus mendampingi mereka.”

Alhasil, Niken rela menempuh perjalanan sejauh 30 km di sore hari dengan bermotor sendirian dari tempat tinggalnya ke lokasi binaan. “Akhirnya kelompok yang kami rintis ini pun berdiri,” katanya. Tak hanya itu karena kesuksesan warga di desa tersebut dalam mengembangkan budidaya ikan lele dan industri pengolahannya, banyak desa lain yang kemudian tertarik untuk membangun hal serupa. “Dalam jangka waktu dua tahun akhirnya saya bisa mengembangkan delapan kelompok binaan.”

Saat berkolaborasi bersama Tim Penyuluh Pertanian, Niken mengetahui jika mereka memiliki program Simantri (sistem pertanian terintegrasi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan). “Oleh Tim Penyuluh pertanian ini saya kemudian diminta untuk membina kelompok perikanan di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan,” katanya. Lagi-lagi ia harus menempuh perjalanan yang melelahkan untuk mencapai lokasi tersebut. Desa ini berada di dataran tinggi berjarak sejauh 70 km. Namun hal itu menurutnya bukan menjadi halangan jika mengingat tekad yang ia miliki. “Saya ingin berhasil dan menunjukkan kepada Kepala Dinas perikanan di Buleleng bahwa saya mampu,” katanya.

Ketika program penyuluhannya berhasil, Niken pun mengajak Kadis Perikanan Buleleng dan beberapa pejabat dinas datang ke lokasi untuk melihat jerih payahnya. “Supaya mereka tahu bahwa meski ditugaskan di lokasi binaan yang jauh, saya tetap bekerja dengan baik dan menghasilkan prestasi,” tegasnya. Prestasi yang ia raih tak berhenti. Pada acara Gerakan Nasional Peduli Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (Gempita) tahun 2014 di Jakarta, Niken membawa serta kelompok Sari Luwih yang menjadi binaannya untuk bertemu Susi Pudjiastuti yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan perikanan. Tak disangka, pada momen Gempita Nasional tersebut, Kelompok Sari Luwih terpilih dalam enam besar kelompok berprestasi tingkat nasional.

“Saya terharu sekali ketika berhasil mengantarkan kelompok Sari Luwih ini berprestasi di tingkat nasional. Apalagi mengingat jika dibandingkan kelompok lain, SDM yang saya miliki paling rendah dalam hal tingkat pendidikan,” kata Niken. “Ketika SDM kelompok lain berpendidikan tingkat S-1, kelompok saya lebih banyak yang hanya berpendidikan SMP hingga SMA saja.”

Kegembiraan pun rupanya dirasakan anggota kelompok Sari Luwih. Bukan saja karena mereka mendapatkan prestasi tingkat nasional, namun juga karena memiliki kesempatan untuk bisa ke Jakarta. “Ternyata mereka sama sekali belum pernah ke Jakarta,” cerita Niken. Meski terdengar lucu namun ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya untuk bisa mengenalkan mereka ke dunia luar.

Mengubah *mindset*

Niken yang sejak awal tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Seksi Penyuluhan di Satminkal/UPT Balai Besar Perikanan Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol Bali, bercerita bahwa kondisinya penyuluhan saat ini sudah jauh berbeda dengan apa yang ia alami dulu. “Sejak lembaga penyuluhan berada langsung di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tugas pokok dan fungsinya menjadi lebih jelas dan terarah,” katanya. “Ketika Pusat Pelatihan dan Penyuluhan (puslatluh) KKP memberikan tugas, maka semua penyuluh di seluruh Indonesia menerima tugas yang sama.”

Puslatluh KKP bahkan memberikan target dan memberlakukan indikator keberhasilan program penyuluhan masing-masing tenaga penyuluh di daerah. “Karena itu para penyuluh harus bisa mengubah mindset mereka dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru dalam menjalankan tupoksinya,” kata Niken. Menurutnya, tugas penyuluh adalah mengubah mindset pelaku utama. Dari yang sebelum tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mau hingga menjadi mau sampai mereka bisa mandiri.

“Sekarang ini kita justru harus mengubah mindset dari penyuluh itu sendiri,” katanya. Dari yang sebelumnya seolah tanpa arah, tiba-tiba para penyuluh ini harus menerima banyak tugas dan kewajiban yang harus dijalankannya. Jadi tidak bisa lagi bekerja seperti sebelumnya. Inilah yang kemudian menurutnya menjadi tantangan para penyuluh saat ini. “Apalagi penyuluh ini datang dari berbagai macam daerah yang memiliki karakteristik dan budayanya sendiri.”

Jadi, menurutnya, yang perlu dilakukan adalah menyamakan persepsi setiap penyuluh. “Dengan berbagai macam tupoksi yang diberikan oleh Puslatluh, saya rasa para penyuluh kini menjadi lebih mudah untuk menyamakan persepsi tersebut,” katanya. Apalagi, menurut Niken, Puslatluh KKP sudah memberikan sarana dan wadah bagi para penyuluh untuk mengembangkan diri melalui berbagai macam pelatihan hingga akses informasi yang lebih mudah. “Dengan era digitalisasi, teman-teman penyuluhan memang harus mengubah kebiasaan mereka,” tegasnya.

Contoh sederhana, kata Niken, di dalam tupoksinya para penyuluh ini harus membuat materi penyuluhan berupa media cetak (berupa brosur, terbitan leaflet, hingga buku), tertayang (materi yang dipresentasikan), visual (video), dan terdengar (audio). “Artinya, untuk bisa memenuhi semua tanggung jawab pembuatan media tersebut, para penyuluh harus belajar kembali mendapatkan keterampilan-keterampilan untuk membuat media tersebut,” katanya. Penyuluh era saat ini, kata Niken, harus mengikuti perkembangan zaman, bahkan ini harus dilalui penyuluh-penyuluh senior. “Saya yakin awalnya mereka akan mengeluhkan ini. Namun dengan adanya arahan dan juga dukungan tapi para penyuluh muda, tantangan ini bisa diatasi.”



Prinsip dalam memberikan penyuluhan

Ia sendiri mengaku dalam memberikan penyuluhan memiliki prinsip khusus. “Saya tidak pernah menganggap para pelaku usaha lebih rendah atau lebih bodoh dari saya, baik secara pengetahuan maupun pendidikan. Apalagi rata-rata umur mereka lebih tua dari saya,” jelasnya. “Sebagai penyuluh, saya tidak ingin menimbulkan kesan menggurui atau pun memerintah.”

Menurutnya, ia harus memahami bahwa meskipun secara pendidikan dirinya lebih tinggi dari mereka namun secara pengalaman mungkin mereka lebih baik darinya. “Karena itu saya lebih banyak sharing pengetahuan ketimbang menggurui,” tutur Niken. Contoh kecil, menurutnya, dalam satu jam kunjungan, ia menghabiskan waktu selama 45 menit untuk berbincang masalah sehari-hari warga. Tentang keluarga maupun kegiatan usahanya. “Saya lebih banyak mendengarkan cerita-cerita mereka.”

“Saya menganggap mereka sebagai keluarga. Prinsip yang saya pegang dalam penyuluhan adalah harus mengerti dulu kondisi mereka terlebih dulu, bagaimana karakteristiknya sehingga komunikasi antara saya dan mereka pun berjalan lancar. Menurutnya, jika kita ingin didengarkan maka kita harus mendengarkan mereka lebih dulu. “Baru di lima belas menit terakhir saya mulai memberikan materi. Metode ini ternyata cukup efektif dan masyarakat terbukti cepat menyerap ilmu yang diajarkan,” jelasnya.

Niken, secara pribadi, ketika bekerja harus memiliki komitmen dan tujuan. “Jika memang saya bekerja hanya untuk mendapatkan gaji, mungkin saya juga tak perlu bekerja keras memajukan kelompok-kelompok yang saya bina. Jadi dalam bekerja saya harus memiliki progres,” pungkasnya.

BAB VIII

PANTANG MENYERAH MENGUBAH *MINDSET* PELAKU USAHA UTAMA

Mengubah *mindset* nelayan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi para penyuluh perikanan. Namun bukan berarti mereka harus menyerah. Para penyuluh perikanan di Karianggu, Balikpapan, membuktikan kesuksesan mereka dengan menciptakan “Nelayan Berdasi”.

Saat pertama kali menginjakkan kakinya di Desa Solok Oseng, Karianggu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kabupaten Balikpapan pada tahun 2017, Faisal Nur Oktavian, penyuluh perikanan harus memutar otaknya. Wilayah binaannya penuh dengan lahan tambak namun tidak banyak aktivitas budidaya yang dilakukan warga. Lahan-lahan tambak tersebut lebih banyak yang non aktif dan tidak terpakai. “Rupanya nelayan di desa ini lebih banyak yang menggantungkan hidupnya pada usaha perikanan tangkap,” kata Faisal. “Mereka belum memikirkan untuk melakukan diversifikasi usaha.”

Tahun 2018, terjadi peristiwa besar yang mengubah kondisi nelayan di desa ini. Terjadi kebocoran pipa minyak milik PT Pertamina Persero yang mencemari area seluas 12 ribu hektar di kawasan Teluk Balikpapan. Termasuk di kawasan pesisir Karianggu. Material minyak dari pipa yang bocor ini mencemari kawasan pesisir desa, termasuk keramba-keramba kepiting yang tersebar di sepanjang pantai desa tersebut. Imbasnya, nelayan mengalami kerugian besar. Kepiting-kepiting di dalam keramba banyak yang mati, areanya pun tak lagi bisa digunakan.

“Selain itu wilayah tangkap nelayan menjadi semakin jauh dari pantai dan tentunya semakin menambah biaya produksi mereka,” kata Faisal. Sebagai penyuluh perikanan, Faisal dan teman-temannya memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kondisi tersebut. Setelah pihak Pertamina berkomitmen memberikan ganti rugi, ia lalu mengajak warga untuk mulai membuka usaha budidaya udang. “Kami menggunakan bantuan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina,” jelasnya.

Ternyata usulan para penyuluh perikanan ini tak langsung direspon warga. Mungkin, kata Faisal, mereka sudah terbiasa hidup dari usaha perikanan tangkap sebelumnya. Namun langkah Faisal tak lekassurut. Ia pun melakukan pendekatan kepada beberapa kelompok nelayan yang sangat terdampak akibat kejadian pencemaran minyak Pertamina tersebut. “Kita ajak mereka berdiskusi untuk memulai diversifikasi usaha ini,” katanya. Bujukannya terbukti berhasil. Para ketua kelompok ini bisa menggerakkan warga untuk memulai usaha budidaya kepiting soka atau kepiting cangkang lunak.



“ *Perusahaan ini telah menanam 2000 bibit mangrove di sepanjang kawasan pesisir Balikpapan Barat.* ”

Dengan bantuan Pertamina nelayan kemudian membangun fasilitas budidaya kepiting soka dan penggemukan kepiting bakau. Hasil-hasil budidaya kemudian mereka jual ke para pengepul. Harganya lumayan, berkisar antara Rp 25 ribu sampai Rp 100 ribu per kilogram. Seiring dengan tingginya permintaan pasar, nelayan yang tergabung pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Patra Bahari Mandiri pun semakin menikmati hasilnya. Omset yang mereka mencapai Rp 40 juta per bulan. Kepiting bakau yang dewasa dan kepiting soka yang dihasilkan nelayan ini juga didistribusikan ke beberapa rumah makan, restoran, serta kafe-kafe ternama di Kota Balikpapan.

Sementara untuk pemulihan kondisi lingkungan pantai yang terdampak kebocoran minyak, warga mendapatkan bantuan CSR dari PT Petrosea Tbk, sebuah perusahaan energi yang menginduk pada Indika Energy. Perusahaan ini telah menanam 2000 bibit mangrove di sepanjang kawasan pesisir Balikpapan Barat. Kampung mereka kini mendapat julukan sebagai Kampung “Nelayan Berdasi” dan menjadi sebuah kawasan edukasi wisata alam.

“Ada filosofi tersendiri dari julukan ini,” kata Faisal. Menurut Faisal, pada dasarnya nelayan merupakan profesi yang sangat mulia. “Ia bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kebutuhan pangan masyarakat di sekelilingnya. Namun selama ini imej dari masyarakat tentang pekerjaan nelayan selalu negatif. Artinya bukan pekerjaan yang menjadi pilihan. “Atas dasar itu kemudian terpikir untuk mengubah mindset tersebut. Kami para penyuluh kemudian terpikir untuk menggunakan kata “Nelayan Berdasi”. Ini lebih kepada impian bahwa nelayan pun sebenarnya bisa ‘berdasi’,” jelas Faisal.

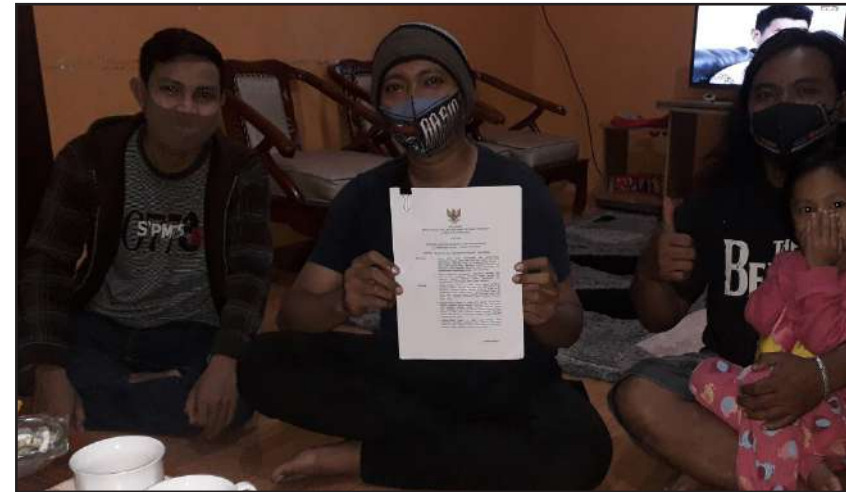
Tak hanya itu, sesuai julukannya maka setiap warga yang datang ke lokasi Kampung Nelayan Berdasi ini akan diminta untuk mengenakan dasi sebagai ciri khas dan tiket masuk kawasan. Nelayan ini ingin para pengunjung merasa bahwa mereka juga memiliki kecerdasan dan kesempatan yang sama seperti para pengusaha besar serta harapan ke depannya, profesi nelayan ini dapat diperhitungkan dan manfaatnya dapat dirasakan bagi masyarakat terutama kami para nelayan.

Berbagai cara dilakukan warga dan penyuluh perikanan dalam mempromosikan Kampung Nelayan Berdasi. Antara lain melalui media sosial, Koran lokal, radio. “Namun yang lebih efektif ternyata promosi dari mulut ke mulut,” kata Faisal. Lambat laun kawasan ini pun mulai dikenal warga, baik dari sekitar Karianggu maupun desa-desa lainnya.

Tak hanya berhenti menjadi pembudidaya kepiting soka, nelayan juga melakukan inovasi lainnya. Melalui bimbingan tenaga ahli dari Universitas Hasanuddin, Makassar mereka menciptakan ekstrak herbal (ekstrak bayam) untuk merangsang proses percepatan molting (pelepasan kulit dan pergantian cangkang keras) dengan kisaran waktu molting, 14 hari lebih cepat dari molting secara alami.

Kemudian atas bantuan Pertamina, nelayan juga didampingi oleh tenaga ahli dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) untuk memanfaatkan limbah cangkang kepiting soka untuk dibuat menjadi produk kaldu kepiting dengan merk “braco”. Produk ini telah memiliki nomor PIRT dan dipasarkan melalui online market. “

“ *Berbagai cara dilakukan warga dan penyuluh perikanan dalam mempromosikan Kampung Nelayan Berdasi. Antara lain melalui media sosial, Koran lokal, radio.*



Bekerja Efektif

Menurut Faisal, di Kelurahan Kariangau terdapat 6 Kelompok binaan. Terdiri dari 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB), 2 Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklashar), dan 2 Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan). Ketika ditunjuk untuk menjadi penyuluh perikanan di Karianggu, Faisal mengaku sadar betul dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh di Balikpapan. Jumlahnya sedikit namun wilayah kerjanya cukup banyak. “Sehingga banyak dari kita yang harus merangkap wilayah,” katanya.

Menurut Faisal, awalnya ia mengajak para pelaku utama untuk mengadakan pertemuan kelompok satu bulan sekali. “Namun setelah dipikir-pikir ternyata agenda tersebut kurang efektif,” katanya. Pasalnya, antusias anggota kelompok untuk mengikuti pertemuan sangat minim. “Yang datang lebih banyak pengurus-pengurus inti kelompok saja.”

Akhirnya setelah dicapai kesepakatan jika pertemuan diadakan selama dua bulan sekali. “Namun pertemuan dengan pengurus inti tetap kita adakan selama satu bulan sekali,” jelasnya. Caranya ini rupanya lebih efektif. Pelaku utama lebih antusias mengikuti pertemuan dan selalu ada informasi-informasi terbaru yang disampaikan.

BAB IX

KONSISTENSI BERBUAH MANIS

Bagi Nurfatah, menjadi penyuluh perikanan bukan sekedar bekerja untuk mendapatkan penghasilan bulan, tapi juga ibadah. Pengabdianya selama 31 tahun telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketika itu tahun 1989 ketika Nurfatah untuk pertama kali memulai karirnya sebagai tenaga penyuluh perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lulusan SPP SUPM Bogor tahun 1988 ini memulai tugasnya di Kecamatan Cibinong, Kedunghalang, dan Citereup. “Saat itu kondisinya belum seperti sekarang,” kata Nurfatah memulai ceritanya.

Wilayah-wilayah binaan, lanjutnya, masih memiliki akses terbatas. “Jalan-jalan masih berupa tanah merah dan liat. Bila hujan, tanah menjadi becek dan licin,” kata Nurfatah. Ia kerap harus berjalan kaki menuju lokasi-lokasi kelompok binaan yang jauh berada di dataran tinggi. Seringkali semakin jauh berjalan sepatunya bertambah berat karena tertempel tanah. “Pernah suatu kali saya menyewa ojek, karena tidak punya motor, namun karena jalanan licin motor tergelincir sehingga seluruh pakaian kotor.”

Namun semua tantangan berat itu ia jalani. “Karena motivasi saya menjadi penyuluh adalah untuk menjalani hidup sebagai manusia yang bermanfaat untuk orang lain,” tuturnya. Menurutnya bila pekerjaan ini dilakukan dengan standar ibadah bisa menghantarkan seseorang manusia menjadi sebaik-baik manusia di bumi ini.

“Upaya menjadikan pelaku utama perikanan agar tahu, mampu dan mau menerapkan informasi dan teknologi yang berguna bagi dirinya dan orang lain dilaksanakan oleh penyuluh perikanan,” katanya. Ini berarti memberi tau bagi yang belum tahu, mengajarkan keterampilan sehingga trampil (mampu) dan mendorong agar mau menerapkan. Prinsip ini menurutnya sudah tertanam sejak ia kecil.

Nurfatah lahir dan dibesarkan di Sleman, tepatnya di Cangkringan. Cangkringan merupakan satu Kecamatan atau Kapanewon yang ada di lereng Gunung Merapi. Semasa kecil ia banyak menghabiskan waktu bermain dan bersekolah di Dusun Brongkol Desa Argomulyo, sebuah dusun yang terletak di posisi paling selatan di Kecamatan Cangkringan berbatasan dengan Kecamatan Ngemplak.

Kedua orangtuanya, Muh Aminudin dan Siti Aminah adalah keluarga petani kecil yang menggarap lahan seluas 3.500 m . Lahan seluas ini ditanami padi dan palawija sesuai pola tanam, sering pula menanam padi dan ditebar ikan (mina padi) bekerjasama dengan Balai Benih Ikan yang ada tak jauh dari Dusun Brongkol, hanya 400 m. Nurfatah lalu melanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri III IKIP Yogyakarta, yang merupakan salah satu SMP Teladan saat di Yogyakarta. Ia mulai menekuni kegiatan perikanan saat menempuh pendidikan di SPP SUPM Bogor lulus tahun 1988. Sempat mengikuti Tugas belajar di Diklat APP Bogor Jurusan Penyuluhan Perikanan di Cikaret selesai Tahun 1996 dan Menyelesaikan S1 di Instiut Pertanian Yogyakarta tahun 2004.

“Selama pendidikan sekolah, saya terbiasa menjadi anggota pramuka dan mendampingi pengajian anak-anak di masjid,” katanya. Kebiasaan inilah yang menurutnya berhasil menanamkan prinsip hidup untuk berkarya dan bekerja yang memberikan manfaat ke orang lain. “Saya berpikir bahwa ilmu perikanan yang didapat saat sekolah harus bisa ditransfer ke orang lain dan menjadi penyuluh perikanan adalah solusinya,” jelasnya.



Pengalaman-pengalaman berorganisasi yang ia miliki selama di sekolah juga menurutnya turut membantu pengetahuannya. “Seperti membantu menyelesaikan permasalahan dinamika kelompok dari sulitnya permasalahan. Baik masalah internal kelompok maupun masalah lainnya,” tuturnya. “Ketika mampu menyelesaikan masalah ini dengan baik, sehingga kelompok binaan lebih dinamis dan produktif, menjadi kebahagiaan tersendiri.

Cerita Kesuksesan

Ada kepuasan tersendiri yang dirasakan para penyuluh perikanan saat kerja keras mereka membina kelompok masyarakat membuah hasil. Hal ini pula yang dirasakan oleh Nurfatah. Ia bercerita bahwa ketika itu sedang ramai budidaya lele dumbo sehingga Kelompok Jantung Harapan, yang merupakan binaanya di Cibinong ingin beralih dari budidaya lele lokal ke lele dumbo. “Saya kemudian mendampingi mereka melaksanakan teknologi kawin suntik (induce breeding) lele dumbo di tahap awal dengan segala keterbatasan peralatan dan bahan,” jelasnya. Hasilnya, dari mulai hanya bisa membenihkan 1 ekor, kemampuan kelompoknya terus berkembang hingga berhasil membenihkan ratusan hingga ribuan ekor berlangsung lama.

Bahkan kelompok binaanya ini meraih Juara Nasional Budidaya Ikan Lele, Kelompok ini membenihkan lele dumbo dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan cacing sutera yang tumbuh di selokan sekitar permukiman. “Ada kepuasan sendiri yang saya rasakan saat itu.”

Tahun 2002, setelah selama 12 tahun bertugas di Bogor, Nurfatah dipindah tugaskan ke Kabupaten Sleman, Jawa Tengah. Ia mengaku di kabupaten ini tugas pembinaan kelompok jauh lebih mudah bila dibandingkan di Bogor. “Karena kelompok berkembang didukung iklim usaha perikanan yang mendukung,” katanya. Salah satu binaannya, yaitu Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Taruna, Garongan, Turi, bahkan mampu meraup omset usaha lebih dari Rp 3 miliar per tahun.

Ia juga pernah mengantar Pokdakan Mino Ngremboko, salah satu binaannya, sebagai Juara Nasional Gempita tahun 2014, Sebagai Penyuluh Perikanan Teladan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sampai mengikuti upacara HUT RI di Istana Negara.



“*Keluarga sangat mendukung dan mengerti pekerjaan saya sebagai penyuluh, meski harus sering ditinggal hingga malam karena menghadiri pertemuan kelompok,*”

Dukungan Keluarga

Menurut Nurfatah, pengabdianya selama lebih dari 31 tahun sebagai penyuluh perikanan juga tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh keluarganya. Tahun 2004, ia menikahi Sri Mulyaningsih dan sudah dikarunia 3 anak. “Keluarga sangat mendukung dan mengerti pekerjaan saya sebagai penyuluh, meski harus sering ditinggal hingga malam karena menghadiri pertemuan kelompok,” katanya. Bahkan tak jarang di hari libur pun masih harus menemui pembudidaya ikan atau kelompok. “Seringkali saat di rumah pun masih harus bekerja untuk menyelesaikan administrasi penyuluhan dan pelaporan.”

Nurfatah berharap generasi penerus penyuluh perikanan saat ini mau terus mengasah dan mengembangkan inovasi perikanan dengan menggunakan segala potensi yang ada. Menurutnya usaha yang dilakukan secara serius dengan berpedoman pada disiplin ilmu yang dimiliki serta dilakukan secara konsisten akan berdampak langsung pada diri sendiri dan orang lain. “Rasa puas akan tercapai manakala usaha telah dilakukan secara maksimal,” jelasnya.

Sementara bagi Pelaku Utama perikanan teruslah mengembangkan inovasi, selalu memperbarui informasi dan ilmu pengetahuan, menerapkan dalam proses produksi, dan berorganisasi secara baik tentu hasilnya usaha akan baik dan lestari. “Saran saya untuk pengembangan penyuluhan perikanan ke depan agar memperbanyak percontohan agar mudah diakses oleh pembudidaya ikan. Mekanisme kerja yang ada diperbaiki dan diperkaya dengan teknologi informasi terkini,” pungkasnya.

BAB X

SABAR PEMBUKA JALAN KESUKSESAN

Keberhasilan seorang penyuluh perikanan akan terasa bila kehadiran dan keberadaannya dinantikan dan dibutuhkan pelaku utama yang menjadi binaan. Hal ini yang dirasakan oleh Endang Sobarna, selama 39 tahun menjadi penyuluh perikanan.

Endang Sobarna mengawali karirnya sebagai penyuluh perikanan pada tahun 1982, setelah membaca sebuah pengumuman penerimaan Tenaga Teknis honorer dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Dengan hanya bermodal ijazah kelulusan SMA, ia lalu mencoba melamar posisi tersebut. Motivasi yang ia miliki saat itu adalah bisa memiliki penghasilan dan membantu orangtua membiayai sekolah adik-adiknya.

“Setelah lulus SMA, Saya pernah menjalani pekerjaan sebagai menjadi tukang service mesin tik dan operator mesin photo copy di Kota Cianjur bersama kakak selama kurang lebih dua tahun,” cerita. Pengalaman itu menurutnya menumbuhkan jiwa mandiri pada dirinya.



Lamarannya sebagai tenaga penyuluh honorer diterima. Sebelum bekerja ia diharuskan mengikuti pendidikan budidaya ikan sistem air deras di BBAT Sukabumi selama 3 Bulan tepatnya pada Bulan Desember 1982 sampai Bulan Februari 1983. “Di situlah saya pertama kali mengenal dunia perikanan. Mulai dari jenis-jenis ikan, cara ikan berkembang biak, habitat ikan, budidaya ikan, pakan ikan dan lainnya,” tutur Endang. Setelah menjadi diklat, ia lalu ditempatkan di Balai Benih Ikan Sentral Wanayasa sebagai tenaga teknis honorer sampai dengan Bulan Maret tahun 1986.

Pekerjaan yang ditawarkan mulai dari bidang teknis pertanian Kehutanan, perkebunan, dan Perikanan. “Dan saya memutuskan untuk memilih bidang teknis Perikanan,” katanya. Bekerja di bidang baru membuat Endang harus banyak belajar. Kegemarannya untuk terus menambah pengetahuan membantu ia banyak menambah ilmu di bidang Perikanan. Pada Bulan Maret 1986 Endang akhirnya mendapatkan SK CPNS dan di tempatkan di Kecamatan Wanayasa sebagai tenaga Penyuluh Pertanian dengan bobot pekerjaan bidang Perikanan. Sejak itu sampai dengan Agustus 2021, Endang genap 34 tahun menjalani pengabdian sebagai penyuluh perikanan PNS.

Cerita Suka dan Duka

Banyak cerita suka dan duka yang dialami Endang selama menjadi tenaga penyuluh perikanan. “Yang saya rasakan tidak mudah untuk menjadi seorang penyuluh perikanan,” katanya. Untuk menjadi penyuluh perikanan, kata Endang, harus memiliki banyak ilmu, baik ilmu teknis perikanan maupun ilmu penyuluhan dan juga pengalaman yang cukup. “Saya merasa dengan menjadi penyuluh perikanan, keberhasilan kita bekerja akan terasa bila keberadaan kita dibutuhkan pelaku utama, kemudian adanya kelompok-kelompok yang dinamis.” Katanya.

Ilmu dan pendidikan tersebut, menurutnya, sangat penting dalam proses membina para pelaku utama binaan. “Para pelaku utama ini sangat beragam. Mereka berasal latar belakang tingkat pendidikan, usia, adat istiadat, budaya, karakter, sehingga susah untuk menyamakan persepsi,” katanya. Hal ini sering ditemui di lapangan ketika ada suatu program yang harus di laksanakan, mereka tidak melakukannya sesuai juknis. Misal, kata Endang ketika penyuluh dengan kelompok telah menyepakati diadakan pertemuan kelompok dihadiri semua anggota, namun saat pelaksanaannya masih ada anggota yang tidak hadir. “Begitupun dalam pengerjaan administrasi kelompok, dan yang lainnya sehingga bekerja menjadi penyuluh perikanan perlu kesabaran dan keikhlasan yang tinggi.”

Ia ingat betul bagaimana ketika sebuah momen yang menurutnya paling menyedihkan selama dirinya mengabdikan sebagai penyuluh perikanan. Saat itu, sekitar tahun 2018, ketika penyuluh perikanan masih berada di bawah naungan Dinas Perikanan dan Peternakan kabupaten. “Saat itu kami para penyuluh perikanan mendapat fasilitas inventaris kendaraan roda dua yang bersumber dari DAK,” cerita Endang.

Sebelumnya, untuk melakukan penyuluhan, Endang dan para penyuluh lainnya terkadang harus berjalan kaki dari satu desa ke desa lainnya. Begitupun ketika mengadakan anjang sana ke pelaku utama harus berjalan tak mengenal cuaca panas maupun hujan, saat itu alat komunikasi/HP belum ada, sehingga sering terjadi kelambatan dalam penyampaian informasi. “Untung saat itu kami masih muda masih memiliki fisik yang stabil,” kenangnya. Karena itu ketika mendapatkan fasilitas motor inventaris mereka mengaku sangat bahagia. Motor tersebut, menurutnya, sangat dirawat dengan

baik oleh para penyuluh karena satu satunya fasilitas yang dapat mendukung kelancaran mereka di lapangan. Selang satu tahun berikutnya, terjadi perubahan di mana status kepegawaian penyuluh perikanan ditarik sepenuhnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga bukan lagi berada di bawah dinas.

“Motor inventaris yang sebelumnya kami gunakan ternyata ditarik kembali oleh dinas dengan alasan masih banyak pekerja Dinas yang belum memiliki fasilitas kendaraan tersebut,” katanya. Segala coba ditempuh oleh para penyuluh untuk tetap menggunakan fasilitas tersebut, termasuk meminta langsung kepada kepala dinas. Namun nasi sudah menjadi bubur, keputusan sudah bulat dan para penyuluh harus kehilangan kendaraan yang selama ini membantu mereka melaksanakan tugasnya.

Namun itu bukan menjadi penghalang besar bagi para penyuluh. Tugas dan tanggung jawab tetap mereka laksanakan dalam membina pelaku utama menjadi lebih baik lagi. Karena di balik cerita-cerita duka tersebut ada banyak cerita yang membahagiakan yang dialaminya selama menjadi penyuluh Perikanan. Salah satunya adalah ketika kelompok pembudidaya ikan “Mina Lestari” yang beralamat di di Desa Salam Jaya Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, yang merupakan kelompok binaannya keluar sebagai Juara pertama tingkat nasional kategori Pembenihan Ikan Nila.

“Waktu itu kami diundang untuk menghadiri penyerahan hadiah yang akan di berikan di Gedung Mina Bahari KKP Jakarta,” cerita Endang. Mereka lalu berangkat ke Jakarta dan menginap di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penyerahan hadiah dijadwalkan pada sore hari sekitar jam 17.00 WIB. “Kami tiba di Gedung Mina Bahari KKP satu jam lebih awal.”

Saat sedang menunggu di teras lobi gedung mereka melihat kedatangan Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta kala itu. “Saya bersama ketua kelompok segera menyambut beliau dan mendampinginya menuju lantai 2 melalui tangga eskalator,” kata Endang. Saat berjalan mendampingi itu, lanjutnya, Bupati Purwakarta menyampaikan rasa bangganya kepada kelompok karena telah mengangkat nama baik Purwakarta hingga ke tingkat nasional. “Kami benar-benar haru bahagia mendengar ucapan tersebut.”

“*Saat itu di sepakati terbentuk sebuah kelompok di beri nama kelompok “Pusaka Nirwana” beranggotakan 10 orang dan pihak BBI Wanayasa memberikan bantuan stimulan Induk Ikan Nila Nirwana sebanyak 30 Paket,”*

Kebahagiaan yang menurut Endang dan kelompok binaannya sebagai kenangan yang tidak akan terlupakan. Kebahagiaan yang hakiki ketika sebuah cita-cita atau program yang kami canangkan terwujud yang tentunya melalui proses yang tidak sebentar. “Saya bahagia ketika ada peningkatan kesejahteraan dari pelaku yang kita bina, saya bahagia ketika ketua kelompok dapat membangun rumah permanen, memiliki fasilitas motor bahkan mobil. dan Usahanya berjalan di bidang Perikanan,” tuturnya.

Mampu Menarik Minat Anak-anak Muda

Cerita membahagiakan lainnya adalah ketika Endang bisa membuat kelompok binaannya menjadi pionir yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketika itu penyuluh perikanan, koordinator penyuluh, dan BBI Wanayasa berembung untuk menciptakan satu kawasan sentra pembenihan ikan Nila Nirwana di sekitar lokasi BBI. Diawali dengan inventarisasi lokasi kolam yang ada yang tidak produktif mereka kemudian mengumpulkan warga pemilik kolam dan bermusyawarah membentuk kelompok pembudidaya ikan. “Saat itu di sepakati terbentuk sebuah kelompok di beri nama kelompok “Pusaka Nirwana” beranggotakan 10 orang dan pihak BBI Wanayasa memberikan bantuan stimulan Induk Ikan Nila Nirwana sebanyak 30 Paket,”kata Endang.

Setiap bulan, para penyuluh dan kelompok mengadakan pembinaan melalui pertemuan rutin. Mereka juga terus memantau proses produksi larva dan pemijahan ikan nila. Berbagai masalah

mereka hadapi karena masih minimnya pengetahuan tentang usaha budidaya ini. Waktu terus berlalu kelompok terus berkembang jumlah anggota bertambah produksi merangkak bertambah jalinan pasar terus meningkat. Pada tahun 2010, mereka mendapatkan permintaan dari pasar Filipina dengan kuota 1000.000 ekor per tiga hari. “Namun hasil produksi kami saat itu masih rendah,” kata Endang.

Akhirnya pemasaran diarahkan pada wilayah di luar kelompok sesuai dengan topografi wilayah. Bersama Dinas Perikanan Purwakarta, mereka lalu mulai memetakan wilayah budidaya. Untuk Kecamatan Wanayasa dan Kiara pedes ditetapkan sebagai wilayah Pembenuhan. Untuk Kecamatan Pasawahan, Plered dan Darangdan ditetapkan sebagai wilayah pendederan dan Kecamatan Jati luhur dan Mantiis yang memiliki lokasi KJA di Danau Jatiluhur dan Cirata di tetapkan sebagai wilayah Pembesaran.

“Tiga Bulan sekali kami mengundang pelaku utama dan usaha perikanan dari tiap wilayah/Kawasan berkumpul di BBI. Kami berkumpul bermusyawarah agar ketiga wilayah dapat tersambung dalam kegiatan usaha perikanan,” katanya. Dengan dukungan dan bantuan fasilitas dari balai, usaha kelompok terus berkembang bahkan mampu menarik minat anak-anak muda untuk berusaha di bidang pembenuhan ikan. “Mereka berani menyewa sawah untuk dijadikan kolam pembenuhan karena secara teknis maupun ekonomis usaha budi daya ikan lebih menguntungkan dibandingkan dengan usaha budidaya padi.”



Tahun 2014 terbentuk kelompok yang di beri nama “Narwana”. Singkatan dari “Nagrog Wanayasa”. Anggotanya saat itu berjumlah 15 orang. Dengan produksi sekitar 8.000.000 sampai 10.000.000 ekor larva per bulan. Kelompok Narwana mampu mengembangkan usahanya dan berhasil membentuk Koperasi dengan nama koperasi Narwana. Anggota mereka pun bertambah menjadi 35 orang. Pada tahun 2018 telah berhasil menyalurkan dana yang bersumber dari BLU KKP sebesar Rp 2 Milyar. “Alhamdulillah sampai sekarang lancar,”

Perkembangan usaha budidaya ikan Nila Nirwana di segmen pembenuhan semakin menarik para kaum muda di sekitar Wiayah yang berdekatan yaitu Desa Nagrog desa Sakambang dan Desa Cibuntu,, sehingga usaha tersebut menjadi pilihan bagi para kawula muda. Dan pada Bulan September 2020, terbentuk kelompok yang anggotanya cukup banyak sampai 60 orang dengan produksi larva bisa mencapai 1 juta sampai 2 juta ekor per hari. Kelompok tersebut di beri nama “Kelompok Pembudidaya ikan Berkah Nirwana Jaya”.

Saat ini di Desa Nagrog kecamatan Wanayasa sudah berdiri 3 kelompok pembenuhan ikan nila dengan hasil produksi benih ikan nila ukuran larva yang menembus angka 100 juta hingga 800 juta per bulan. Mereka rata-rata memanfaatkan lahan sawah untuk diubah menjadi kolam budidaya ikan. Hal ini terjadi karena usaha budidaya ikan lebih menguntungkan di banding tanam padi.

Melanjutkan Cita-cita

Satu hal penting lainnya yang juga menjadi kebahagiaan bagi Endang saat menjalani profesi sebagai tenaga penyuluh perikanan adalah mampu mewujudkan cita-citanya yang dulu sempat tertunda. Yaitu melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Endang lahir dan dibesarkan sebuah desa di pinggiran kota Cianjur. Nama yang diberikan oleh kedua orangtuanya, kata Endang, merupakan sebuah harapan agar ia kelak bisa menjadi anak yang penyabar dalam menjalani hidup. “Saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Ayah seorang kepala Sekolah Dasar yang juga menjalani kehidupan sebagai seorang petani, sementara ibu adalah Ibu Rumah tangga.”

Ia mengenyam bangku pendidikan sejak SD hingga SMA di Cianjur. “Dulu berharap bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan memiliki untuk menjadi seorang guru,” katanya. Karena itu ia sangat memimpikan untuk bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Namun saat itu Tuhan belum mewujudkan keinginannya mendapatkan gelar sarjana keguruan. “Alhamdulillah setelah bekerja sekian lama akhirnya pada tahun 1996 saya menamatkan pendidikan di APP Bogor dan mendapat gelar sarjana muda (A.Md). lalu pada tahun 2006 mendapat gelar Sarjana Pertanian (SP) setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanian Bale Bandung (STIPER).”

Endang sendiri akan menyelesaikan masa tugasnya pada Agustus 2021. Selama 34 tahun ia telah banyak makan garam kehidupan sebagai penyuluh perikanan. “Pekerjaan menjadi penyuluh perikanan merupakan pekerjaan yang mulia, jika diresapi dan dihayati pekerjaan tersebut dapat mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik, baik dari segi pendapatan maupun kesejahteraan. Namun pekerjaan tersebut memerlukan kesabaran dan ketekunan karena semuanya perlu waktu dan proses yang tidak sebentar,” katanya.



“ Saya juga berharap kepada para pelaku utama binaan agar bisa terus memajukan usahanya dan apat menjalin komunikasi di dalam maupun di luar kelompok, selalu mencari informasi dan ilmu perikanan yang lebih maju,”

Meski perjuangan yang harus ia lalu sangat berat, namun ia tetap berpegang teguh pada prinsipnya dalam menjalankan tugas. “Menjalani Hidup maupun bekerja harus bersabar dan selalu bersyukur, jangan putus asa terhadap suatu kegagalan dan tidak puas terhadap sesuatu yang dianggap berhasil,” tuturnya.

Karena itu ia berharap agar para generasi penyuluh perikanan selanjutnya dapat memiliki etos kerja, bekerja tidak hanya menjalankan tugas atau menyampaikan suatu program tapi juga memiliki niat yang tertanam dalam hati bahwa bekerja dapat memberikan hasil dalam memajukan sektor perikanan begitupun dapat merubah kehidupan para pembudidaya ke arah yang lebih baik. “Saya juga berharap kepada para pelaku utama binaan agar bisa terus memajukan usahanya dan apat menjalin komunikasi di dalam maupun di luar kelompok, selalu mencari informasi dan ilmu perikanan yang lebih maju,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan sarannya bagi pengembangan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan yang saat ini dipimpin langsung oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM). “Ada formasi CPNS untuk regenerasi penyuluh perikanan yang terus berkurang yang butuh perhatian, calon tenaga penyuluh perikanan sebaiknya lulusan dari Sekolah Tinggi perikanan Jurusan Penyuluhan Perikanan, berbagai fasilitas penyuluh perikanan di lapangan harus lebih dilengkapi lagi, penyuluh perikanan lebih didekatkan dengan Satmingkal, serta untuk meningkatkan kinerja penyuluh di lapangan sebaiknya diadakan penilaian kelompok yang berprestasi setahun sekali dari mulai Kabupaten, provinsi, sampai nasional,” jelasnya.

Daftar Pustaka

- _____. 2020. Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, KKP.
- Ardiwinata, 1962. Pemeliharaan Ikan Mas di Sawah. Penerbit Sumur Bandung.
- Castells, M. 2004. *The Network Society: A Cross-cultural Perspective*.
- Chadijah, S. 2020. Kiat Sukses Pembinaan Pelaku Utama Perikanan yang Tergabung Dalam Dua Puluh Lima Kelompok dan Lima Koperasi Perikanan Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.
- Choeronawati, A.I. 2020. Strategi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Purworejo.
- Fagi, A.M., A. Hasanuddin, dan I. Manwan. 1989. Pokok-pokok pemikiran menunjang pewilayahan komoditas. Makalah disampaikan dalam Seminar Model Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan. Unhas, Ujung Pandang, 7 Oktober 1989.
- Haurissa, A. 2020. Berjibaku di Tengah Pandemi Covid-19.
- Leilani, A., Nurmalia, N., & Patekkai, M. (2015). Efektivitas Penggunaan Media Penyuluhan (Kasus pada Kelompok Ranca Kembang Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten). *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 9(1), 43-54.
- Making, F.H. 2020. Dari Lereng Merapi Menyentuh Dunia.
- Razi, F. 2020. Pengembangan Strategi Penyuluhan Perikanan Pada Wilayah Perkotaan Dalam Rangka Menjawab Tantangan Penerapan Materi dan Metode Penyuluhan Pada Usaha Pengolahan Amplang Ikan di Masa New Normal, Studi Kasus di Kota Banjarbaru.
- Romeon, N. R. 2020. Strategi Penyuluhan Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Abon Ikan Tuna (*Thunnus albacore*) Saat Pandemi Covid-19 Pada Poklarsar “G&R Masohi Shop” di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
- Saady, Y. 2020. Akselerasi Digitalisasi Pelayanan Penyuluhan Perikanan di Tengah Pandemi Covid-19. BPPP Tegal.
- Setiawan, H.D. 2020. Pemanfaatan Fitur Video Call, Formulir Daring dan SMS Blast Dalam Mendukung Pelaksanaan Penyuluhan Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Sutisna, D. 2020. Sikap Proaktif Penyuluh: Antara Kegiatan Penyuluhan dan Risiko Corona?
- Tribunews. 2020. Menjadi Tenaga Penyuluh Perikanan Bantu, Ayu Cintai Pekerjaannya karena Ingin Berbagi Pengetahuan. [Tribunews.com](https://tribunews.com)
- Trisnawati, A. 2020. Ikanku Fresh Sebagai Strategi Penyuluhan Perikanan yang Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Berau. Satminkal BPPP Tegal.
- Trubus.id.2019. Adaptasi Revolusi Industri 4.0, Penyuluh Perikanan Didorong Bertransformasi Milenial. (<https://news.trubus.id/baca/31378/adaptasi-revolusi-industri-40-penyuluh-perikanan-didorong-bertransformasi-milenial>)
- Widjadja, S. 2019. Desa Tematik: Serba-serbi Kekayaan Negeri.
- Yulianty, D.W. 2020. Penyuluhan Perikanan Daring yang Jenius, Salah Satu Strategi Penyuluhan Perikanan di Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kecamatan Ajibarang Purwokerto Barat dan rawalo Kabupaten Banyumas*

Profil Penulis



Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi, M.Si
KEPALA PUSLATLUH KP

Dr. Lilly Aprilya Pregiwati lahir di Jakarta pada 7 April 1968. Memiliki pengalaman lebih dari 27 tahun di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), saat ini ia menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP). Selama kariernya, Lilly telah malang melintang di berbagai bidang. Pada 2015 hingga 2019, ia ditunjuk sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri di mana ia bertanggung

jawab dalam publikasi dan mendukung kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Senada dengan itu, ia juga pernah menempati posisi Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi pada tahun 2014-2015.

Sebelumnya pada tahun 2009, Lilly mengemban posisi Kepala Bagian Perencanaan setelah ia sukses menjalankan perannya sebagai Kepala Subbagian Kerja Sama dan Kepala Subbidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dalam kurun waktu 2005-2009. Di bidang pelatihan dan penyuluhan, Lilly juga pernah memangku tanggung jawab sebagai Kepala Subbidang Materi Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan selama 2001-2005. Pengalaman ini, diperkaya dengan segudang perjalanannya, memperkaya Lilly dalam mengorganisir SDM kelautan dan perikanan.

Lilly menyelesaikan pendidikan Diploma 3 dalam bidang akuakultur di Ahli Usaha Perikanan (AUP) pada 1989 silam. Lalu ia melanjutkan Diploma 4 pada bidang yang sama di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta pada 1993. Pada tahun 2000, Lilly memperoleh gelar sarjana perikanan dari Institut Perikanan Bogor (IPB). Ia kemudian menyelesaikan studi magisternya di bidang perikanan laut di IPB pada tahun 2007. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 2017, Lilly memperoleh gelar doktor di bidang teknologi kelautan dari IPB.

Pada tingkat internasional, Lilly juga pernah mengenyam pendidikan informal terkait Study of Environmental and Socio-Economy dari ASEAN-EEC. Selain itu, ia pernah memperoleh pendidikan mengenai Fish Pathology di Japan International Cooperation Agency (JICA), Jepang. Ia juga pernah mengikuti pendidikan mengenai Aquaculture Technology di Korea International Cooperation Agency (KOICA), Korea.

Buku ini menjadi sumbangsih Lilly untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat ikut membangun SDM kelautan dan perikanan melalui pelatihan. Melalui digitalisasi dan sejumlah inovasi pelatihan yang dilakukan Lilly di bawah kepemimpinannya di Puslatluh KP, ia berharap Indonesia akan mencetak semakin banyak nelayan, pembudidaya, petambak, pengolah hasil laut, maupun ASN yang mumpuni guna mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah.



Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Kelautan dan Perikanan